



Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta



RENJA

RENCANA KERJA

2024

Biro Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahun kedua periode Renstra Tahun 2022-2027 yang bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan. Rencana Kerja Tahun 2024 terdiri dari pendahuluan, hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun lalu, tujuan, sasaran, indikator kinerja yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, program/kegiatan, dana indikatif beserta sumbernya di 2024 dan prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif di tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan pencapaian target kinerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tahun 2024.

Program dan kegiatan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tahun 2024 terkait dengan substansi perubahan di bidang tata kelola pemerintahan yang meliputi bidang kelembagaan, analisa jabatan dan ketatalaksanaan serta sejalan dengan tema pembangunan DIY Tahun 2024. Program dan kegiatan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY berpedoman pada rencana strategis Biro tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2022-2027 yang menjadi pedoman pembuatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, Renstra dan Renja tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian Renja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2024 kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semua pihak, khususnya untuk pelaksanaan program kegiatan Biro Tata Pemerintahan Tahun 2024 ke depan. Biro Tata Pemerintahan membutuhkan dukungan dan kerja sama sinergis dari berbagai pihak, sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di DIY.

Yogyakarta, 28 Juli 2023

KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



KPH. YUDANEGARA, Ph.D.
NIP. 198110262002031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2022 (n-2).....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Tahun 2022.....	8
A. Sasaran Pertama: Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama.....	34
B. Sasaran Kedua: Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan.....	42
C. Sasaran Penunjang: Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah.....	45
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	49
2.2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	49
2.2.2 Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum.....	55
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	61
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	82
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	122
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	122
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	126
3.3 Program dan Kegiatan.....	129
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	141
BAB 5 PENUTUP.....	142
LAMPIRAN.....	144

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Tabel T-C.29).....	9
Tabel 2. 2 Efisiensi Anggaran Berdasarkan Sasaran.....	32
Tabel 2. 3 Capaian Target Kinerja Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2022.....	33
Tabel 2. 4 Dinamika Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah serta pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren yang direspon dengan kebijakan.....	40
Tabel 2. 5 Dinamika Persentase kepemilikan dokumen penting kependudukan.....	44
Tabel 2. 6 Dinamika Kategori RB Perangkat Daerah.....	45
Tabel 2.7 Lembaga/Instansi yang bekerja sama dalam pemanfaatan NIK.....	52
Tabel 2. 8 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022.....	53
Tabel 2. 9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2022.....	54
Tabel 2.10 Progres sinkronisasi garis batas di DIY.....	59
Tabel 2. 11 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Otonomi Daerah Tahun 2022.....	60
Tabel 2.12 Permasalahan RB Kalurahan.....	69
Tabel 2. 13 Rencana Kinerja Tahun 2024.....	82
Tabel 2. 14 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	83
Tabel 2. 15 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	104
Tabel 2. 16 Usulan Program dan Kegiatan dan sumber Dana Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025.....	104
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD.....	128
Tabel 3. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	129
Tabel 4. 1 Rencana Kerja Tahunan (RKT).....	141

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sistem Birokrasi Pemerintah Kalurahan.....74

Gambar 2.2 Susunan Organisasi Perangkat Daerah.....81



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya (Alder (1999) dalam Rustiadi (2008:339). Berdasarkan definisi tersebut, perencanaan menjadi langkah pokok dalam menentukan aktivitas kedepannya serta opsi-opsi pengendaliannya jika aktivitas tersebut tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Perencanaan menjadi tahap awal dalam melakukan manajemen pembangunan, hal tersebut dikarenakan kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumber daya (*resources*) yang tersedia. Pemerintah dituntut untuk dapat memanfaatkan sumber daya tersebut secara efektif dan efisien agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil dan tepat sasaran. Perencanaan pembangunan yang baik dapat menjadi dasar untuk merumuskan kegiatan pembangunan secara efisien dan efektif sehingga hasilnya dapat optimal dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia, definisi tersebut termuat dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 angka 1. Selanjutnya Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 1 angka 3 didefinisikan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan berjalan sinergis dengan penganggaran, baik di tingkat Pusat maupun Daerah.

Renja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun Anggaran 2024 memiliki keterkaitan langsung dengan Rencana Strategis Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yang disusun untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2022-2027 disusun sebagai dasar pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu 2022-2027, khususnya pada tahun 2024-2027 karena program, kegiatan, dan subkegiatan tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 yang telah disusun untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 70 Tahun 2021 dimana diinstruksikan bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada Renja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2024 ini juga mencakup program, kegiatan, dan subkegiatan yang dibiayai dari Dana Keistimewaan baik pada urusan kebudayaan, urusan pertanahan maupun urusan kelembagaan. Program Renja diselaraskan dengan program dan kegiatan di atasnya agar sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

Terdapat delapan regulasi pada level undang-undang yang mempengaruhi dan membawa konsekuensi untuk implementasi perencanaan dan penganggaran tahun 2024 pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY tahun 2024 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Perda 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan DIY;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No 24 Tahun 2013;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah;
15. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional;
16. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan ke IV atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
19. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Penetapan Batas Daerah Istimewa Yogyakarta – Jawa Tengah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
28. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
29. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Adminduk dan KIA;
31. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
32. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
33. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Data Kependudukan;
34. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak;
35. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;
36. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
37. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pedoman Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara Anggota DPRD DIY dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
38. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan;
39. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Setda DIY;

40. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027;
41. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud:

- a. Memberikan arahan, acuan dan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan;
- b. Mengefektifkan dan mengarahkan proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan:

Tersusunnya perencanaan daerah yang komprehensif, transparan, akuntabel, partisipatif serta selaras dengan visi misi Pemerintah Daerah DIY.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum serta sistematika penyusunan Rencana Kerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tahun 2023.

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu (Tahun 2021/n-2)

Bab ini berisi evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III : Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan Renja, sasaran Renja dan uraian Program dan Kegiatan Renja.

BAB IV : Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Penutup

Bab ini berisi penutup dari uraian Bab-Bab sebelumnya.

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2022 (n-2)

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara target program, kegiatan dan subkegiatan pada Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dengan realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada tahun 2022, yang selanjutnya memproyeksi realisasi capaian target dalam Rencana Strategis (Renstra) pada tahun berjalan. Dengan demikian diperoleh informasi mengenai realisasi program kegiatan dan subkegiatan yang mencapai target dan tidak mencapai target, serta program kegiatan dan subkegiatan yang melampaui target pada tahun 2022. Disamping itu, evaluasi juga dilakukan terhadap keadaan pegawai pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY beserta dengan analisis kebutuhan pegawai (data per tanggal 31 Desember tahun 2022), serta keadaan sarana dan prasarana pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tahun anggaran (TA) 2022.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Tahun 2022

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY selanjutnya digunakan untuk menentukan program kegiatan dan subkegiatan yang mencapai target dan tidak mencapai target, serta program kegiatan dan subkegiatan yang melampaui target pada tahun 2022, khususnya program, kegiatan dan subkegiatan hasil redesain SKPD pada tahun 2022. Penentuan capaian target didasarkan pada kolom 8 atau kolom prosentase Tingkat Realisasi (Realisasi Renja SKPD tahun 2022 dibagi dengan Target Renja SKPD tahun 2022). Berikut disampaikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sampai dengan tahun 2022.

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Tabel T-C.29)**

Nama Perangkat Daerah : Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Lembar : 1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) n-1	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
2.10.1 1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase rumusan bahan kebijakan penataan administrasi batas daerah dan toponimi	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.10.1 1.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terselenggaranya penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.10.1 1.5.01. 01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan	1 Dokumen	n/a	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	500%

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) n-1	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat								
2.10.1 1.5.03	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Terlaksananya Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	100%	100%
2.10.1 1.5.03. 01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah Sarana dan Prasaranaa Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	n/a	n/a	1 Unit Laptop, 1 Unit Printer, 1 Unit Software arc gis	1 Unit Laptop, 1 Unit Printer, 1 Unit Software arc gis	100%	n/a	1 Unit Laptop, 1 Unit Printer, 1 Unit Software arc gis	100%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
2.13.0 4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase rumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) n-1	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.13.0 4.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100%	n/a	n/a	n/a	0	100%	100%	100%
2.13.0 4.1.01. 02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	n/a	n/a	n/a	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.13.0 4.1.01. 04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	1 Dokumen	n/a	n/a	n/a	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.13.0 4.1.01. 05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	n/a	n/a	n/a	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) n-1	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Presentase rumusan bahan kebijakan urusan kebudayaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Terlaksananya Kegiatan Sejarah, Bahasa, dan Permuseuman	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	100%	100%
2.22.08.5.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	n/a	n/a	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	n/a	2 Dokumen	100%
2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Tersedianya Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.22.08.5.06.03	Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	Jumlah Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	n/a	1 Dokumen	391 Unit	391 Unit	100%	1 Unit	392 Unit	100%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase tercapainya fasilitasi dokumen	88,75%	98,99%	88,66%	88,66%	100%	88,70%	88,70%	99,94%

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) n-1	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		peristiwa kependudukan (KTPel dan KIA) bagi masyarakat di DIY								
2.12.0 2.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan pendaftaran kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.12.0 2.1.01. 02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	80 Dokumen	221 Dokumen	80 Dokumen	80 Dokumen	100%	50 Dokumen	351 Dokumen	439%
2.12.0 2.1.01. 04	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Instansi yang memanfaatkan data kependudukan	n/a	3 Instansi	3 Instansi	3 Instansi	100%	n/a	6 Instansi	100%

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) n-1	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.12.0 2.1.01. 05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	1 Dokumen	n/a	n/a	n/a	0	n/a	n/a	0
2.12.0 2.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	100%	n/a	n/a	n/a	0	100%	100%	100%
2.12.0 2.1.02. 01	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	n/a	n/a	n/a	0	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.12.0 2.1.02. 02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	n/a	n/a	n/a	0	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.12.0 3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase tercapainya	99,18%	98,99%	87,97%	87,97%	100%	99,15%	99,15%	99,97%

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) n-1	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		fasilitasi dokumen peristiwa penting (Akta kelahiran bagi anak dan Akta kematian) bagi masyarakat di DIY								
2.12.0 3.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.12.0 3.1.01. 04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	300%
2.12.0 3.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	100%	n/a	n/a	n/a	0	100%	100%	100%
2.12.0 3.1.02. 01	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	n/a	n/a	n/a	0	1 Laporan	1 Laporan	100%

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) n-1	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.12.0 3.1.02. 04	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	3 Dokumen	n/a	n/a	n/a	0	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
2.12.0 3.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil	100%	n/a	n/a	n/a	0	n/a	n/a	0
2.12.0 3.1.03. 01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	n/a	n/a	n/a	0	n/a	n/a	0
2.12.0 4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	2 Instansi/Lembaga	98,99%	15 Instansi/Lembaga	15 Instansi/Lembaga	100%	2 Instansi/Lembaga	17 Instansi/Lembaga	850%

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) n-1	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.12.0 4.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.12.0 4.1.02. 01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	n/a	n/a	n/a	0	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.12.0 4.1.02. 02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Masyarakat yang memahami Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak 2. Laporan Hasil Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu Tahun 2024	n/a	850 Orang	300 Orang, 1 Laporan	300 Orang, 1 Laporan	100%	n/a	1.150 Orang, 1 Laporan	100%

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) n-1	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.12.0 4.1.02. 05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 Dokumen	6 Dokumen	300%
2.12.0 4.1.02. 07	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Masyarakat yang sadar Adminduk	n/a	2,000 Orang	600 Orang	600 Orang	100%	n/a	2,600 Orang	100%
2.12.0 4.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Tercapaiannya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%
2.12.0 4.1.03. 01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	n/a	2 Laporan	200%
2.12.0 5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase tersusunnya profil kependudukan	100%	98,99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) n-1	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		sesuai standar								
2.12.0 5.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.12.0 5.1.01. 01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Konten yang dikembangkan dari sistem informasi kependudukan	n/a	n/a	2 Konten	2 Konten	100%	n/a	2 Konten	100%
2.12.0 5.1.01. 02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
SEKRETARIAT DAERAH										
0.00.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,60%	100%	87,49%	87,49%	100%	87,50%	87,49%	99,87%

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) n-1	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
0.00.0 1.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0.00.0 1.1.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	12 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	22 Dokumen	440%
0.00.0 1.1.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	n/a	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	n/a	4 Dokumen	100%
0.00.0 1.1.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 Laporan	300%
0.00.0 1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0.00.0 1.1.02. 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	200%

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) n-1	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
0.00.0 1.1.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	300%
0.00.0 1.1.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	n/a	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	8 Laporan	200%
0.00.0 1.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
0.00.0 1.1.03. 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	n/a	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	100%

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) n-1	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
0.00.0 1.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kualitas pegawai dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	100%	100%
0.00.0 1.1.05. 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1. Peningkatan pemahaman kebijakan adminduk bagi masyarakat dan atau petugas adminduk. 2. Sosialisasi program adminduk melalui media cetak dan elektronik.	n/a	90 Orang, 3 Jenis	120 Orang, 4 Jenis	120 Orang, 4 Jenis	100%	n/a	210 Orang, 7 Jenis	100%
0.00.0 1.1.05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan kapasitas aparatur adminduk di Kabupaten/Kota	n/a	130 Orang	90 Orang	90 Orang	100%	n/a	220 Orang	100%
0.00.0 1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) n-1	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
0.00.0 1.1.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	300%
0.00.0 1.1.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	6 Paket	300%
0.00.0 1.1.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	300%
0.00.0 1.1.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	6 Paket	300%
0.00.0 1.1.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	n/a	n/a	n/a	0	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
0.00.0 1.1.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	300%

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) n-1	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		dan Konsultasi SKPD								
0.00.0 1.1.06. 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	n/a	1 Dokumen	100%
0.00.0 1.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%
0.00.0 1.1.07. 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	n/a	n/a	n/a	0	n/a	n/a	0%
0.00.0 1.1.07. 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	n/a	0	n/a	n/a	0%

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) n-1	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
0.00.0 1.1.07. 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	n/a	n/a	n/a	0	n/a	n/a	0%
0.00.0 1.1.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	n/a	5 Unit	125%
0.00.0 1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0.00.0 1.1.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	400%
0.00.0 1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0.00.0 1.1.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) n-1	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
0.00.0 1.1.09. 010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	n/a	1 Unit	1 Unit	100%	n/a	2 Unit	200%
0.00.0 1.1.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	100%	11 Unit	11 Unit	100%
0.00.0 1.1.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%
4.01.0 3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1. Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah 2. Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah 3. Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	####	100%	100%

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) n-1	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		naskah kerja sama dalam negeri yang terealisasi								
4.01.0 3.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Terlaksananya tugas pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.0 3.1.01. 02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	4 Dokumen	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	4 Dokumen	100%
4.01.0 3.1.01. 03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	4 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	7 Dokumen	175%
4.01.0 3.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Otonomi Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.0 3.1.02. 02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 2. Laporan Penyelesaian Permasalahan Urusan Pemerintahan. 3. Laporan Standar	n/a	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	n/a	6 Dokumen	100%

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) n-1	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Pelayanan Minimal 6 bidang SPM .								
4.01.0 3.1.02. 03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	2 Laporan	5 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	2 Laporan	11 Laporan	550%
4.01.0 3.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Terlaksananya fasilitasi kerja sama daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.0 3.1.03. 01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	2 Dokumen	n/a	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	200%
4.01.1 0	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase rumusan bahan kebijakan kelembagaan kalurahan	100%	100%	100%	100%	100%	####	100%	100%
4.01.1 0.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	Terlaksananya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan urusan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) n-1	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		keistimewaan								
4.01.1 0.5.01. 010	Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Dibina	2 Dokumen	n/a	n/a	n/a	0	7 Dokumen	7 Dokumen	350%

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) n-1	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.1 0.5.01. 05	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	1. Kajian Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta. 2. Kajian Monitoring Pemanfaatan TIK dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan. 3. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kelembagaan Kalurahan dan Kapanewon/Kemantren. 4. Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan. 5. Rancangan Rencana Strategis Reformasi Birokrasi Terbatas Kalurahan. 6. Sosialisasi kelembagaan asli daerah.	n/a	3 Dokumen, 1 Laporan, 1 Aplikasi, 60.000 Vaksin, 392 Kalurahan	2 Dokumen, 1 Laporan, 1 Aplikasi, 1 Dokumen/Rancangan produk Hukum, 60 kali	2 Dokumen, 1 Laporan, 1 Aplikasi, 1 Dokumen/Rancangan produk Hukum, 60 kali	100%	n/a	5 Dokumen, 2 Laporan, 1 Aplikasi, 1 Dokumen/Rancangan produk Hukum, 60 kali, 60.000 Vaksin, 392 Kaluraha	100%

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 (n)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) n-1	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.1 1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY	Persentase akumulasi capaian fisik aktivitas perangkat-perangkat daerah pengampu urusan tatacara	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	n/a
4.01.1 1.5.01	Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Terselesaikannya pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur tepat pada waktunya	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	n/a
4.01.1 1.5.01. 01	Koordinasi Pemberhentian, Penetapan dan Pengesahan Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pemberhentian, Penetapan dan Pengesahan Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	n/a	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	n/a	1 Dokumen	100

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi dari target yang telah disusun seluruhnya dapat memenuhi target dari yang telah ditetapkan. Dari sisi indikator output (keluaran) secara makro seluruhnya memenuhi target, Tetapi apabila di lihat dari indikator inputnya dari sisi realisasi anggarannya terdapat beberapa serapan yang tidak optimal yang dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Dari target anggaran sebesar Rp. 7.832.914.756 (100%), diperoleh angka realisasi sebesar Rp. 6.495.558.248 (82,93%). Berikut disampaikan efisiensi anggaran per sasaran strategis Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2022:

Tabel 2.2 Efisiensi Anggaran Berdasarkan Sasaran

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang direspon dengan kebijakan	388	82,17	17,83
2	Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan	Jumlah instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	100	84,17	15,83

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2022

Berdasarkan tabel analisis efisiensi di atas dapat diketahui bahwa sasaran pertama dengan 1 (satu) indikator yaitu Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang direspon dengan kebijakan memiliki nilai efisiensi 17,83%. Efisiensi anggaran terjadi karena faktor eksternal di antaranya kebijakan APBD untuk tidak membelanjakan rekening tertentu yang tidak sesuai dengan peruntukannya, efisiensi pada *Ad cost* perjalanan dinas, Akomodasi narasumber pusat, honorarium narasumber, uang harian/transport peserta, makan dan minum rapat, belanja jasa konsultasi, ATK-kertas cover, penggandaan, sewa gedung, efisiensi belanja kawat/internet, dan lain-lain. Beberapa efisiensi tersebut tidak mengganggu capaian indikator output kegiatan, sehingga capaian output bahkan melebihi dari target yang ditentukan yakni sebesar 388%.

Sedangkan indikator dari sasaran kedua yaitu Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK, memiliki nilai efisiensi 15,83%. Hal tersebut terjadi karena terdapat efisiensi di beberapa rincian objek belanja pada sasaran kedua. Beberapa efisiensi tersebut tidak mengganggu capaian indikator output kegiatan, sehingga capaian output tetap $\geq 100\%$ dari target yang ditentukan.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Gubernur DIY dengan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, sasaran strategis Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tahun 2022 adalah : 1) Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama; dan 2) Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan; dengan target Renstra dan realisasi capaian Renstra tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 2.3 Capaian Target Kinerja Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2022		Realisasi Capaian Renstra Tahun 2022		% Rasio Capaian Renstra Tahun 2022	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	2	3	4		5		6	
1	Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang direspon dengan kebijakan	100	Rp6.047.854.800	388,23	Rp4.969.376.693	388,23	17,83
2	Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan	Jumlah instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	15	Rp569.332.000	15	Rp479.190.937	100	15,83
Rata-rata Capaian							244,115	16,83

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2022

Berdasarkan capaian target kinerja di atas, selanjutnya dilakukan analisis per sasaran kinerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada Renstra Tahun 2022. Secara umum capaian renstra tahun 2022 telah memenuhi target, bahkan pada indikator Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang direspon

dengan kebijakan melebihi target yaitu sebesar 388,23% dari target 100%. Kerangka pendanaan sasaran tersebut didukung oleh APBD dan Dana Keistimewaan sejumlah Rp6.047.854.800,00-.

Pada sasaran kedua Meningkatnya tertib administrasi kependudukan mendapatkan dukungan tambahan dari Dana Alokasi Khusus sebesar anggaran Rp428.811.956,00-, APBD sebesar Rp569.332.000,00-, untuk melaksanakan Pelayanan Administrasi Kependudukan sehingga total anggaran tahun 2022 yang terdiri dari APBD dan DAK sejumlah Rp998.143.956,00-. Berikut disampaikan evaluasi dan analisis Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tahun 2022 berdasarkan tabel di atas.

D. Sasaran Pertama: Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama.

Sasaran pertama dalam Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tahun 2022 adalah Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama.

A.1. Indikator Kinerja: Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang direspon dengan kebijakan

Target indikator kinerja dan keuangan persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang direspon dengan kebijakan pada Renstra tahun 2022 sebesar 100% dan Rp6.047.854.800. Sedangkan realisasi capaian Renstra tahun 2022 untuk kinerja dan anggaran masing-masing mencapai 388,23% dan Rp4.969.376.693,00. Dengan demikian diperoleh rasio capaian Renstra tahun 2022 terhadap target dan realisasi sebesar 388,23% kinerja dan 17,83% anggaran (Tabel 2.3).

Secara makro, performa Biro Tata Pemerintahan Setda DIY untuk mencapai indikator kinerja persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang direspon dengan kebijakan (dengan target 100%) berjalan sangat optimal. Sampai dengan akhir triwulan IV TA 2022, telah dihasilkan 66 dari target 17 rumusan bahan kebijakan dalam merespon dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah, sehingga diperoleh capaian realisasi indikator sebesar 388,23%. Adapun rincian dari 66 rumusan bahan kebijakan tersebut di antaranya ialah:

1. Surat Gubernur DIY kepada Presiden RI Nomor 120/3889 Tanggal 21 Maret 2022 Perihal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DIY Tahun 2021;
2. Surat Gubernur DIY kepada Kepala Dinas Kop& UKM Nomor 120/1167 Tanggal 25 Januari 2022 Perihal Hasil Sementara EPPD Tahun 2021 Terhadap LPPD DIY Tahun 2020 Urusan Kop&UKM;
3. Surat Gubernur DIY kepada Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Nomor 120/1168 Tanggal 25 Januari 2022 Perihal Hasil Sementara EPPD Tahun 2021 Terhadap LPPD DIY Tahun 2020 Urusan PMD;
4. Surat Gubernur DIY kepada Kepala Dinas Perindag DIY Nomor 120/1169 Tanggal 25 Januari 2022 Perihal Hasil Sementara EPPD Tahun 2021 Terhadap LPPD DIY Tahun 2020 Urusan Perindag;
5. Surat Gubernur DIY kepada Kepala BKD DIY Nomor 120/1237 Tanggal 26 Januari 2022 Perihal Hasil Sementara EPPD Tahun 2021 Terhadap LPPD DIY Tahun 2020 Fungsi Kepegawaian;
6. Surat Gubernur DIY kepada Kepala Biro PIWP2 Setda DIY Nomor 120/1167 Tanggal 26 Januari 2022 Perihal Hasil Sementara EPPD Tahun 2021 Terhadap LPPD DIY Tahun 2020 Fungsi Pengadaan;
7. Surat Gubernur DIY kepada Kepala Dinas Kebudayaan DIY Nomor 120/1239 Tanggal 26 Januari 2022 Perihal Hasil Sementara EPPD Tahun 2021 Terhadap LPPD DIY Tahun 2020 Urusan Kebudayaan;
8. Surat Gubernur DIY kepada Kepala Dinas Kominfo DIY Nomor 120/1240 Tanggal 26 Januari 2022 Perihal Hasil Sementara EPPD Tahun 2021 Terhadap LPPD DIY Tahun 2020 Urusan Persandian;
9. Surat Gubernur DIY kepada Kepala DPPM DIY Nomor 120/1167 Tanggal 26 Januari 2022 Perihal Hasil Sementara EPPD Tahun 2021 Terhadap LPPD DIY Tahun 2020 Urusan Penanaman Modal;
10. Surat Gubernur DIY kepada Kepala Dinas Pariwisata DIY Nomor 120/1258 Tanggal 27 Januari 2022 Perihal Hasil Sementara EPPD Tahun 2021 Terhadap LPPD DIY Tahun 2020 Urusan Pariwisata;
11. Surat Gubernur DIY kepada Kepala DPAD DIY Nomor 120/1259 Tanggal 27 Januari 2022 Perihal Hasil Sementara EPPD Tahun 2021 Terhadap LPPD DIY Tahun 2020 Urusan Perpustakaan;

12. Surat Gubernur DIY kepada Kepala DPKP DIY Nomor 120/1061 Tanggal 24 Januari 2022 Perihal Hasil Sementara EPPD Tahun 2021 Terhadap LPPD DIY Tahun 2020 Urusan Pangan;
13. Surat Gubernur DIY kepada Kepala Dislautkan DIY Nomor 120/1062 Tanggal 24 Januari 2022 Perihal Hasil Sementara EPPD Tahun 2021 Terhadap LPPD DIY Tahun 2020 Urusan Kelautan dan Perikanan;
14. Surat Gubernur DIY kepada Kepala DLHK DIY Nomor 120/1063 Tanggal 24 Januari 2022 Perihal Hasil Sementara EPPD Tahun 2021 Terhadap LPPD DIY Tahun 2020 Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
SPM: 9 kebijakan;
15. Surat Gubernur DIY kepada Mendagri Nomor 120/00889 Tanggal 17 Maret 2022 Perihal Penyampaian Laporan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021;
16. Surat Gubernur kepada Kepala Dinas Dikpora DIY Nomor: 120/ 5125 Tanggal 8 April 2022 Perihal Pendataan Standar Pelayanan Bidang Pendidikan;
17. Perihal Surat Gubernur kepada Kepala Dinas Kesehatan DIY Nomor: 120/ 5126 Tanggal 8 April 2022 Perihal Pendataan Standar Pelayanan Bidang Kesehatan;
18. Surat Gubernur kepada Kepala Dinas PUP-ESDM DIY Nomor: 120/ 5130 Tanggal 8 April 2022 Perihal Pendataan Standar Pelayanan Bidang Pekerjaan Umum;
19. Surat Gubernur kepada Kepala Dinas PUP-ESDM DIY Nomor: 120/ 5129 Tanggal 8 April 2022 Perihal Pendataan Standar Pelayanan Bidang Perumahan;
20. Surat Gubernur kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY Nomor: 120/ 5127 Tanggal 8 April 2022 Perihal Pendataan Standar Pelayanan Bidang Tramtibumlinmas;
21. Surat Gubernur kepada Kepala Dinas Sosial DIY Nomor: 120/ 5131 Tanggal 8 April 2022 Perihal Pendataan Standar Pelayanan Bidang Sosial;
22. Pergub Nomor 57 Tahun 2022 Perihal Rencana Aksi daerah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2027;
23. Surat Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Bangda Nomor: 120/ 18454 Tanggal 31 Oktober 2022 Perihal Permasalahan Pendataan Standar Pelayanan Minimal);

24. Surat Gubernur DIY kepada Bupati Sleman Nomor 120/01222 Tanggal 19 April 2022 Perihal Pengajuan Klarifikasi dan Perbaikan BAST Ruas Jalan dari Sleman ke DIY;
25. Surat Gubernur DIY kepada Mendagri Nomor 120/1737 Tanggal 7 Februari 2022 Perihal Laporan Tindak Lanjut Pengalihan P3D Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan atas Surat Ditjen Bina Bangda Nomor 523/3138/Bangda Tanggal 19 Juli 2021;
26. Surat Gubernur DIY kepada Mendagri Nomor 120/1736 Tanggal 7 Februari 2022 Perihal Data Pengalihan P3D Pelabuhan Pengumpan Regional atas Surat Ditjen Bina Bangda Nomor 552/266/Bangda Tanggal 17 Januari 2021;
27. Surat Gubernur DIY kepada Bupati Kulon Progo Nomor 120/8857 Tanggal 31 Mei 2022 Perihal Permohonan Serah Terima Aset Bangunan Kolam Renang dan Taman di SMA Negeri 1 Samigaluh;
28. Surat Gubernur DIY kepada Bupati Bantul Nomor 120/8769 Tanggal 31 Mei 2022 Perihal Penjelasan Terkait Aset Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa Bantul;
29. Berita Acara Verifikasi Nomor 100/2782 Tanggal 18 Agustus 2022 Perihal Hasil Inventarisasi Sarana dan Prasarana (Aset) Kolam Renang dan Taman SMA N 1 Samigaluh Yang Akan diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
30. Berita Acara Nomor 100/2815 ; Nomor 120/14657 Tanggal 22 Agustus 2022 Perihal Serah Terima Sarana dan Prasarana Bangunan Kolam Renang dan Taman SMA N 1 Samigaluh dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 22 Agustus 2022; 8. Berita Acara Nomor 120/03330 Tanggal 27 Oktober 2022 Perihal Verifikasi Hasil Inventarisasi Sarana dan Prasarana Jalan Yang Akan Diserahkan dari Pemda DIY kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
31. Surat Gubernur DIY Nomor 170/00433 tanggal 7 Februari 2022 Hal Tanggapan Konsultasi DPRD Kabupaten Sleman;
32. Surat Gubernur DIY Nomor 170/4538 tanggal 29 Maret 2022 hal Pembentukan Fraksi Baru di DPRD Kabupaten Sleman;
33. Surat Sekretaris Daerah DIY Nomor 125/0979 tanggal 21 Januari 2022 Hal Permohonan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Tahun 2022;

34. Buku Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota di DIY;
35. Surat Gubernur DIY Nomor 131/2802 tanggal 1 Maret 2022 Hal Usulan Penetapan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo;
36. Surat Gubernur DIY Nomor 131/3539 tanggal 15 Maret 2022 Hal Usulan Penetapan Pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta;
37. Nota Dinas No.131/00950 tanggal 22 Maret 2022 Hal 1). Pemberhentian Bupati Kulon Progo. 2). Pengisian Penjabat Bupati Kulon Progo dan Penjabat Walikota Yogyakarta;
38. Surat Gubernur DIY Nomor X.131/5924 tanggal 21 April 2022 perihal Usulan Penjabat Bupati Kulon Progo;
39. Surat Gubernur DIY Nomor X.131/5925 tanggal 21 April 2022 perihal Usulan Penjabat Wali Kota Yogyakarta;
40. Surat Gubernur DIY No. 131/02384 Hal Permohonan Pensiun Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo tanggal 11 Agustus 2022 Kepada Menteri Dalam Negeri;
41. Surat Gubernur DIY No. 131/14881 Hal Permohonan Pensiun Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta tanggal 24 Agustus 2022;
42. Surat Keputusan Gubernur DIY tentang Peresmian dan Pengangkatan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Yogyakarta Nomor 237/KEP/2022 tanggal 22 Agustus 2022 perihal Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kota Yogyakarta, yaitu (Alm.) Sdr. Agusnur yang digantikan oleh Sdri. Nur Anita Owiwanti;
43. Surat Gubernur DIY Nomor 170/15977 tanggal 19 September 2022 hal Tanggapan Konsultasi DPRD Kabupaten Sleman;
44. Surat Gubernur DIY Nomor 177/15485 tanggal 6 September 2022 hal Permohonan Peresmian PAW Anggota DPRD DIY;
45. Database Pilar Batas Daerah DIY pada segmen Batas Kabupaten Sleman - Kabupaten Magelang dan Kabupaten Sleman - Kabupaten Bantul;
46. Laporan Penyelarasan Pembangunan di Wilayah Perbatasan DIY tahun 2022;
47. Pilar perapatan batas daerah Kabupaten Kulon Progo - Kabupaten Purworejo dari Subsegmen Kalurahan Kokap - Desa Hargorejo sampai Kalurahan Hargotirto - Desa Durensari;

48. Sosialisasi Perda No 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan pada 18 Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta;
49. Nota Dinas Kepala Biro Tata Pemerintahan kepada Kepala Biro Hukum No.177/04091 Tanggal 14 Desember 2022, Hal: Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Bantul (a.n. Timbul Harjana dan pengganti Purwana);
50. Nota Dinas Kepala Biro Tata Pemerintahan kepada Kepala Biro Hukum No.177/ 04261 Tanggal 30 Desember 2022, Hal: Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo (a.n. Suprpto dan pengganti Kalis Gatot Raharjo).

Kerja sama daerah dengan daerah lain:

51. Perjanjian Kerja sama Pemda Kab/Kota se-DIY dengan Pemda DIY (Pol PP) tentang Tindak lanjut Penanganan Pengaduan dan Keluhan Masyarakat;
52. Perjanjian Kerja Sama Pemda DIY dengan Pemkot Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta;
53. Kesepakatan Bersama Antara Pemda DIY dan Pemda Kabupaten Purworejo Jateng tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik;
54. Kesepakatan Bersama Antara Pemprov Sumatera Selatan dengan Pemda DIY tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Provinsi Sumatera Selatan;
55. Perjanjian Kerja Sama Pemda DIY dengan Pemkot Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta;
56. Kesepakatan Bersama Antara Pemprov Sumatera Selatan dengan Pemda DIY tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Provinsi Sumatera Selatan;
57. Perubahan Kedua (Adendum Kedua) Perjanjian Kerja Sama Antara Pemda DIY dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Kedua PKS Nomor 119/03010 dan Nomor 0195/8811/2020 tgl. 23 November 2020 tentang Pemanfaatan Galeri KUKM Pasar Kotagede di YIA;
58. Kesepakatan Bersama antara PEMDA DIY dan Pemerintah Kabupaten Trenggalek tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah;

59. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemda DIY dengan Pemkab Purworejo tentang Replika dan Adopsi Sistem Pertanggungjawaban Pembangunan Daerah Pemda DIY di Kab. Purworejo;
60. Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tentang Kerja Sama Andon Penangkapan Ikan;
61. Kesepakatan Bersama Antara Pemprov Jawa Timur dan Pemda DIY tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah;
62. Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY, Pemkab Bantul, Sleman dan Pemkot Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional di Wil. Kab. Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta;
63. Kesepakatan Bersama antara Pemprov Sulawesi Tenggara dan Pemda DIY tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah;
64. Perjanjian Kerja Sama antara Pemda DIY dengan Pemprov Jawa Tengah (pol pp jawa tengah);
65. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemda Provinsi Jawa Barat dengan Pemda DIY tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil;
66. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pariwisata Jateng dengan DIY.

Tabel 2.4 Dinamika Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah serta pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren yang direspon dengan kebijakan

Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah	100%	574.849.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi	1 Tema	323.133.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY	Terselesainya pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur tepat pada waktunya	1 Dokumen	399.160.000

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah pemenuhan sarana prasarana	1 Pelayanan	1.467.359.800
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase rumusan bahan kebijakan otonomi daerah dan kerja sama	100%	491.254.000
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah dan kerja sama	100%	398.621.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata laksana yang berkualitas	100%	1.853.478.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase pelayanan sarana prasarana keistimewaan terhadap pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan pertanahan	100%	540.000.000

Beberapa faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut: (dari faktor penghambat web monev Sengguh Tahun 2022)

1. Pandemi *Covid-19* masih menjadi hambatan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2022. Terutama pada awal tahun pada bulan Januari hingga Februari sempat terdapat kenaikan angka terinfeksi *Covid-19* mencapai angka sekitar seribu per hari;
2. Rapat kerja sama di Bali diundur oleh sekber MPU;
3. Pembangunan Pilar Batas Antara yang akan dibangun di garis batas daerah perbatasan DIY-Jateng belum diatur dalam Permendagri Nomor 141 Tahun 2017, sehingga perlu ada kejelasan aturan dari Pemerintah Pusat;
4. Belum adanya tanggapan dari pusat terkait koordinasi yang telah dilakukan mengenai kejelasan dalam tipe pilar perapatan yang akan dilakukan pengadaan pada perbatasan DIY-Jateng;
5. Ada beberapa tim TKKSD yang berganti karena mendapat promosi;
6. Isian Form pendataan berdasarkan Permendagri 59 Tahun 2021 tentang SPM belum dapat disajikan;
7. Penyerapan anggaran tidak maksimal karena terdapat efisiensi pada beberapa belanja, seperti perjalanan dinas, honorarium narasumber, ATK, dan lain-lain;

8. Pemasangan pilar perapatan batas DIY - Jateng segmen Kab. Kulon Progo - Kab. Purworejo berada di medan yang cukup sulit pada pegunungan menoreh, sehingga memerlukan perencanaan yang matang;
9. Dalam rangka revisi Permendagri Batas DIY - Jateng khususnya segmen batas Kab. Gunungkidul - Kab. Wonogiri dan Kab. Kulon Progo - Kab. Magelang belum bisa tercapai 100% karena terdapat beberapa area yang belum disepakati oleh kedua wilayah yang berbatasan, seperti contohnya area di puncak suroloyo sehingga masih perlu pembahasan lebih lanjut.

Kemudian faktor yang mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut yaitu:

1. Komunikasi dan Koordinasi antara Pemda DIY dengan pemerintah pusat yang baik serta koordinasi internal pemda DIY yang solid. Koordinasi dengan memanfaatkan teknologi informasi lebih dioptimalkan mengingat pandemi *Covid-19* masih berlangsung sehingga sedikit memungkinkan bertatap muka secara langsung.
2. Sarana dan prasarana yang memadai.
3. Tanggung jawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
4. Pemanfaatan akun *Zoom* untuk rapat koordinasi secara daring.
5. Kerja sama yang baik di semua organisasi perangkat daerah Pemda DIY.

E. Sasaran Kedua: Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan

Sasaran kedua adalah Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan Sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: Jumlah instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK.

B.1. Indikator Kinerja: Jumlah instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK

Indikator Jumlah instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK memiliki target kinerja dan anggaran pada tahun 2022 yakni 15 instansi/lembaga dan Rp569.332.000,00-. Sedangkan realisasi capaian Renstra tahun 2022 untuk kinerja dan anggaran masing-masing mencapai 15 instansi/lembaga (100%) dan Rp479.190.937,00. Dengan demikian diperoleh rasio capaian Renstra tahun 2022 terhadap target dan realisasi sebesar 100% kinerja dan 15,83% anggaran (Tabel 2.3). Capaian tersebut tidak terlepas dari terjalannya kerja sama dengan baik antara Instansi terkait Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan *stakeholder*. Capaian kinerja sampai dengan akhir

Bulan Desember 2022 telah terjalin kerja sama pemanfaatan data kependudukan dan NIK dengan 15 (lima belas) instansi/lembaga yaitu:

1. Dinas Kesehatan DIY (digunakan untuk verifikasi data penerima bantuan Jaminan kesehatan);
2. Dinas Sosial DIY (digunakan untuk verifikasi data penerima bansos);
3. Biro Kesra (Biro Bina Mental Spiritual) DIY;
4. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY (digunakan untuk integrasi data pemohon);
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY (terintegrasi dengan aplikasi perijinan HAKI online di dinas perindustrian DIY);
6. Rumah Sakit Panti Rapih (Terintegrasi dengan layanan pendaftaran & database pasien);
7. RSIA Sadewa (Terintegrasi dengan layanan pendaftaran & database pasien);
8. RS Bhayangkara (Terintegrasi dengan layanan pendaftaran & database pasien);
9. Dikpora DIY (digunakan dalam PPDB online dan pemetaan sistem zonasi);
10. Diskominfo DIY (terintegrasi dengan aplikasi jogjapass);
11. Diskop UMKM DIY (digunakan dalam sistem aplikasi sibakul.jogjaprovo.go.id);
12. Dinas Sosial DIY (digunakan untuk verifikasi data penerima bansos), 2021;
13. BKD DIY (melengkapi data kepegawaian di simpeg) 2021;
14. Satpol PP DIY (verifikasi dan validasi data pelaku pelanggaran Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Peraturan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta);
15. RS Ghrasia (mempercepat validasi data pendaftaran pasien).

Tabel 2.5 Dinamika Persentase kepemilikan dokumen penting kependudukan

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)
1	3	4	5
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Jumlah persentase kepemilikan KTP-El, akta kelahiran, dan akta kematian dibagi tiga	87,97%	18.752.000
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Jumlah persentase kepemilikan KTP-El, akta kelahiran, dan akta kematian dibagi tiga	87,97%	150.181.000
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah persentase kepemilikan KTP-El, akta kelahiran, dan akta kematian dibagi tiga	87,97%	193.451.000
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah persentase kepemilikan KTP-El, akta kelahiran, dan akta kematian dibagi tiga	87,97%	206.948.000

Capaian pelaksanaan program/kegiatan pada indikator kinerja ini sangat dipengaruhi oleh dinamika penduduk (pindah datang) dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya memiliki KTP-el (tertib administrasi kependudukan). Berikut faktor penghambat pencapaian indikator Jumlah instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK.

1. Banyak anak di LKSA/panti yang saat dititipkan tanpa disertai dokumen pendukung apapun (contoh : surat kelahiran, surat penyerahan) serta minimnya informasi yang disampaikan pada saat anak dititipkan di panti;
2. Anak sudah bertahun-tahun bersama orang tua asuh dan belum memiliki surat adopsi sehingga belum dapat memiliki dokumen kependudukan;
3. Terdapat beberapa efisiensi belanja seperti transport peserta rapat kerja, belanja alat tulis kantor, kertas, dll;
4. Proses izin ke Ditjen Dukcapil memerlukan waktu yang relatif lama karena banyaknya permohonan yang harus di proses di pusat;
5. Terbatasnya akses database kependudukan akibat penerapan SIAK terpusat, saat ini database kependudukan dikelola sepenuhnya oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri;
6. Belum diberikannya akses data kematian dan kelahiran dari Ditjen Dukcapil karena data masih dalam proses konsolidasi;
7. Terbatasnya data yang dapat diolah sehingga memerlukan waktu untuk memperoleh data dari sektor/bidang lain untuk memperkaya data profil kependudukan.

Kemudian faktor yang mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut yaitu:

1. Kerja sama yang baik di semua organisasi perangkat daerah Pemda DIY;
2. Koordinasi internal cukup solid;
3. Tanggung jawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu;
4. Terjalin koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait seperti Dinas Dukcapil & Dinas Sosial DIY maupun Kabupaten/Kota serta LKSA / panti di bawah naungan Dinas Sosial di DIY;
5. Pemanfaatan akun Zoom untuk rapat koordinasi secara daring;
6. Inovasi pelayanan adminduk yang beragam dan memudahkan masyarakat;
7. Pelaporan data dari Dinas Dukcapil Kab/Kota yang tepat waktu sehingga proses;
8. Tersedianya data konsolidasi bersih (DKB) dari Kemendagri;
9. Komitmen yang tinggi serta kerja sama yang baik dengan Pemerintah Kabupaten se DIY.

F. Sasaran Penunjang: Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah

C.1. Indikator Kinerja: Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Tabel 2. 6 Dinamika Kategori RB Perangkat Daerah

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Keterangan
Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Target	Anggaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Target	Anggaran	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
SEKRETARIAT DAERAH								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							1.215.727.956	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							24.629.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Tersusunnya Renstra Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022-2027	1 dokumen	5.454.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Tersusunnya Renstra Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022-2027	1 dokumen	5.454.000	
	2. Tersusunnya Renja Biro Tata Pemerintahan Tahun 2023	1 dokumen			2. Tersusunnya Renja Biro Tata Pemerintahan Tahun 2023	1 dokumen		
	3. Tersusunnya Renja Perubahan Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022	1 dokumen			3. Tersusunnya Renja Perubahan Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022	1 dokumen		
	4. Tersusunnya ROPK Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022	1 dokumen			4. Tersusunnya ROPK Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022	1 dokumen		
	5. Tersusunnya PK Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022	1 dokumen			5. Tersusunnya PK Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022	1 dokumen		

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Keterangan
Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Target	Anggaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Target	Anggaran	
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1. Tersusuaannya RKA Biro Tata Pemerintahan Tahun 2023	1 dokum en	6.761.00 0	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1. Tersusuaannya RKA Biro Tata Pemerintahan Tahun 2023	1 dokum en	6.761.000	
	2. Tersusuaannya RKAP Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022	1 dokum en			2. Tersusuaannya RKAP Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022	1 dokum en		
	3. Tersusuaannya DPA Biro Tata Pemerintahan Tahun 2023	1 dokum en			3. Tersusuaannya DPA Biro Tata Pemerintahan Tahun 2023	1 dokum en		
	4. Tersusuaannya DPPA-SKPD Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022	1 dokum en			4. Tersusuaannya DPPA-SKPD Biro Tata Pemerintahan Tahun 2022	1 dokum en		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LKj IP Konsep/Bahan LKj Konsep/Bahan LPPD	80 poin, 1 dokum en 1 dokum en	12.414.0 00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LKj IP Konsep/Bahan LKj Konsep/Bahan LPPD	80 poin, 1 dokum en 1 dokum en	12.414.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							41.215.00 0	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifika si keuangan Biro Tata Pemerintahan	1 tahun	31.560.0 00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifika si keuangan Biro Tata Pemerintahan	1 tahun	31.560.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan)	1 dokum en	3.889.00 0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, Dokumen Perencanaan Anggaran dan Dapat Memberikan Informasi Keuangan bagi Pengguna Informasi (laporan keuangan tahunan)	1 dokum en	3.889.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan	12 lapora n	5.766.00 0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan	12 lapora n	5.766.000	
	Laporan Keuangan Semester	2 lapora n			Laporan Keuangan Semester	2 lapora n		
	Laporan Keuangan Triwulanan	4 lapora n			Laporan Keuangan Triwulanan	4 lapora n		
	Laporan Prognosis	1 lapora n			Laporan Prognosis	1 lapora n		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							11.400.00 0	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Keterangan
Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Target	Anggaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Target	Anggaran	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1 tahun	11.400.0 00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1 tahun	11.400.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							311.271.9 56	
Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	1. Peningkatan pemahaman kebijakan adminduk bagi masyarakat dan atau petugas adminduk 2. Sosialisasi program adminduk melalui media cetak dan elektronik		0	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	1. Peningkatan pemahaman kebijakan adminduk bagi masyarakat dan atau petugas adminduk 2. Sosialisasi program adminduk melalui media cetak dan elektronik	120 Orang 4 Jenis	223.567.95 6	Pemanfaatan SILPA DAK 2021 menghasilkan Sub-Kegiatan sosialisasi yang akan dikemas dalam bentuk: - rapat kerja sebanyak 4 kali rapat kerja (untuk kegiatan Pencatatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data) - publikasi ke masyarakat berupa baliho dan iklan layanan masyarakat - pelayanan terpadu pelayanan adminduk dalam rangka meningkatkan cakupan kepemilikan KTP- el di seluruh Kab/Kota
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Peningkatan kapasitas aparatur adminduk di Kabupaten/Kota		0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Peningkatan kapasitas aparatur adminduk di Kabupaten/Kota	90 Orang	87.704.000	Pemanfaatan SILPA DAK 2021 menghasilkan Sub-Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Adminduk yang dilakukan masing-masing satu kali untuk Kegiatan Pencatatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dengan memanfaatkan anggaran SILPA DAK Tahun 2021. (3 Bimtek)
Administrasi Umum Perangkat Daerah							468.512.0 00	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Keterangan
Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Target	Anggaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Target	Anggaran	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	8 jenis	7.996.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	8 jenis	7.996.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	13 jenis	29.621.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	13 jenis	29.621.000	
	Tabung Pemadam Kebakaran	11 tabung			Tabung Pemadam Kebakaran	11 tabung		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15 jenis	7.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	15 jenis	7.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah lembar hasil cetak dan penggandaan	50 lembar	26.810.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah lembar hasil cetak dan penggandaan	50 lembar	26.810.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelesaian permasalahan adminduk di daerah		260.745.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelesaian permasalahan adminduk di daerah	1 Laporan	378.285.000	Pemanfaatan SILPA DAK Tahun 2021 untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi SKPD berupa : - perjalanan dinas ke pusat dalam rangka konsultasi dan koordinasi sebanyak 6 kali - rapat kerja nasional yang sedianya akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 - perjalanan dinas dalam daerah dan rapat koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota dalam rangka koordinasi dan konsultasi
	Tersedianya makanan dan minuman rapat	12 bulan			Tersedianya makanan dan minuman rapat	12 Bulan		
	Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi	12 bulan			Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi	12 Bulan		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terpeliharanya sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Biro Tata Pemerintahan	1 tahun	18.800.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terpeliharanya sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Biro Tata Pemerintahan	1 tahun	18.800.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							5.568.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	1 jenis	5.568.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	1 jenis	5.568.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2.400.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat- menyurat	3 jenis	2.400.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat- menyurat	3 jenis	2.400.000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Keterangan
Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Target	Anggaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Target	Anggaran	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							350.732.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan perorangan dinas atau jabatan	12 unit	123.797.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bukti pembayaran pajak/STNK kendaraan perorangan dinas atau jabatan	12 unit	123.797.000	
		12 unit				12 unit		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan mesin kantor	12 bulan	36.935.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan mesin kantor	12 bulan	36.935.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	190.000.000	Berdasarkan Pergub Nomor 105 tahun 2022 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi menyatakan Bahwa Bagian Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren bertambah subbagian menjadi tiga subbagian sehingga memerlukan ruangan untuk menjadi satu bagian

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Setda DIY, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung di bidang perumusan kebijakan strategis tata pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

2.2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 terbagi dalam tiga bagian penting.

- a) Koordinasi dan fasilitasi sebagai bentuk penguatan fungsi pelayanan di instansi pelaksana Adminduk yang berdampak pada kemudahan penduduk dalam mengurus dokumen kependudukan dan ketercapaian target organisasi.

Strategi penguatan fungsi pelayanan dibedakan menjadi dua jenis yaitu secara vertikal melalui koordinasi dan secara horizontal melalui fasilitasi. Biro Tata Pemerintahan sebagai pengampu urusan Adminduk di tingkat provinsi berperan sebagai penghubung antara pemerintah pusat dengan instansi pelaksana di Kabupaten/Kota. Koordinasi dalam bentuk pertemuan, rapat kerja serta bimbingan teknis dimaksudkan untuk mensosialisasikan kebijakan pusat kepada daerah dan sebaliknya menyampaikan kondisi pelayanan di daerah kepada pusat dengan segala kendala yang ditemui. Setiap tahunnya Ditjen Dukcapil Kemendagri senantiasa mendorong peningkatan pelayanan Adminduk di daerah baik melalui perbaikan regulasi maupun pemutakhiran sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK). Pun juga dalam perjalanannya sepanjang tahun permasalahan yang ditemui di lapangan selalu muncul dan perlu untuk dicari jalan keluarnya bersama. Sedangkan fasilitasi dalam bentuk sosialisasi, layanan terpadu dan perjanjian kerja sama dilakukan dalam rangka mendukung tercapainya target baik dinas di tingkat Kabupaten/kota maupun target Biro Tata Pemerintahan di tingkat provinsi.

Dalam hal peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota didorong untuk selalu berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tidak hanya yang berada di dalam wilayah administratifnya namun juga mereka yang berstatus luar domisili. Kegiatan jemput bola pelayanan dokumen kependudukan secara aktif masih dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota dengan menysasar pemilik KTP-el pemula dan penduduk yang memerlukan pelayanan khusus seperti penduduk yang tinggal di pelosok, penduduk lanjut usia, penduduk dengan disabilitas, dan penduduk rentan lainnya.

Biro Tata Pemerintahan sendiri telah melaksanakan pelayanan terpadu dalam rangka percepatan perekaman KTP-el bagi pemilih pemula Pemilu sebanyak sebelas kali. Kegiatan tersebut dilaksanakan di SMA/SMK di lima kabupaten/kota di DIY. Pelayanan terpadu ini merupakan wujud dukungan Dukcapil terhadap Pemilu yang akan diselenggarakan di tahun 2024. Tidak

hanya itu pelayanan terpadu khusus juga dilakukan sebanyak dua kali, yakni pelayanan perekaman dan penerbitan dokumen kependudukan bagi siswa/siswi penyandang disabilitas dalam rangka tindak lanjut peluncuran Gerakan Bersama Adminduk bagi Penyandang Disabilitas di DIY serta pelayanan terpadu aktivasi identitas kependudukan digital (IKD) bagi ASN di lingkungan Pemda DIY sebagai tindak lanjut arahan Dirjen Dukcapil Kemendagri dalam peningkatan cakupan IKD di daerah. Kedua pelayanan terpadu tersebut dilaksanakan di Bangsal Wiyatapraja Kompleks Kepatihan dan dalam pelaksanaannya melibatkan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota.

Selain itu, dalam rangka menyongsong Pemilu tahun 2024, Biro Tata Pemerintahan menyelenggarakan sosialisasi tahapan Pemilu di kapanewon/kemantren di seluruh kabupaten/kota di DIY. Tujuannya untuk memberikan pemahaman dan informasi terkait kebijakan terkait Pemilu kepada masyarakat dilihat dari kacamata administrasi kependudukan, ketataprajaan dan pemerintahan desa. Melalui sosialisasi ini juga masyarakat dapat menyampaikan permasalahan yang dialami di Pemilu sebelumnya serta mencari solusinya bersama. Kegiatan tersebut dikemas secara luring yang diselenggarakan atas kerja sama Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dengan KPU dan Bawaslu baik provinsi maupun kabupaten/kota.

- b) Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan guna mendukung layanan publik bagi instansi lintas sektor serta langkah awal perwujudan *single identity number*.

Pada tahun 2022, Pemerintah Daerah DIY telah memberikan dukungan pemanfaatan data kependudukan kepada berbagai instansi di DIY. Sampai dengan tahun 2021 terdapat tiga belas instansi yang telah mengadakan perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan dan pada tahun 2022 terdapat penambahan dua instansi yaitu RS Grhasia dan Satuan Polisi Pamong Praja DIY. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7 Lembaga/Instansi yang bekerja sama dalam pemanfaatan NIK

No.	Nama Instansi	Keterangan Pemanfaatan Data
1	Dinas Kesehatan DIY	Verifikasi data penerima bantuan Jaminan kesehatan
2	Dinas Sosial DIY	Verifikasi data penerima bantuan sosial
3	Biro Kesra (Biro Bina Mental dan Spiritual) DIY	Verifikasi dan validasi penerima bantuan terkait kegiatan sosial keagamaan.
4	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY,	Verifikasi dan validasi dalam pengurusan izin investasi oleh BPKM Yogyakarta dan integrasi data pemohon
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY,	Terintegrasi dengan aplikasi perijinan HAKI online di dinas perindustrian DIY
6	Rumah Sakit Panti Rapih,	Terintegrasi dengan layanan pendaftaran dan database pasien
7	RSIA Sadewa	Terintegrasi dengan layanan pendaftaran dan database pasien
8	Rumah Sakit Bhayangkara	Terintegrasi dengan layanan pendaftaran dan database pasien
9	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY	PPDB online dan pemetaan sistem zonasi
10	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	Terintegrasi dengan aplikasi jogjapass
11	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY	Digunakan dalam sistem aplikasi sibakul.jogjaprovo.go.id
12	Dinas Sosial DIY	Verifikasi data penerima bantuan sosial
13	BKD DIY	Melengkapi data kepegawaian di simpeg
14	Satpol PP DIY	Verifikasi dan validasi data pelaku pelanggaran Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Peraturan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
15	RS Ghrasia	Mempercepat validasi data pendaftaran pasien

Sumber : (Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2022)

Capaian ini juga menunjukkan bahwa Biro Tata Pemerintahan Setda DIY telah berhasil memenuhi target jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK sebanyak 15 instansi/lembaga dari target 15 instansi/lembaga (100% dalam persen) di akhir RPJMD 2017-2022.

- c) Capaian target daerah terkait kepemilikan dokumen penting administrasi kependudukan (KTP-el, KIA, akta kelahiran, dan akta kematian)

Capaian target terkait kepemilikan dokumen penting administrasi kependudukan dapat dilihat pada table di bawah:

Tabel 2. 8 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
				Target	Realisasi	Realisasi (%)		
1	Jumlah instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	instansi/ lembaga	13	15	15	100	15	100
2	Jumlah persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%	113,56	87,97	99,33	112,91	87,97	112,91

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2022; sungguh.jogjaprovo.go.id/e-sakip

Pada tahun 2022, Biro Tata Pemerintahan menargetkan 87,97% penduduk di DIY telah memiliki dokumen penting administrasi kependudukan yaitu KTP-el, Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Dari target tersebut sampai dengan akhir Desember 2022 telah terealisasi kepemilikan dokumen penting administrasi kependudukan sebesar 99,33% (112,91% dari realisasi). Dengan kepemilikan dokumen penting administrasi kependudukan, maka masyarakat akan lebih mudah dan terjamin dalam mengakses fasilitas publik.

Capaian kinerja pelayanan tahun 2022 secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 2. 9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2022

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang direspon dengan kebijakan	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	388,23%	100%	100%	100%	-
2.	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	n/a	100	87,97%	92,20%	92,85%	93,50%	99,33%	92,20%	92,85%	93,50%	-

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2022; sengguh.jogjaprov.go.id/e-sakip

Pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pelayanan Biro Tata Pemerintahan pada tahun 2022 dapat tercapai bahkan melampaui target. Pada indikator Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang direspon dengan kebijakan memiliki target 100%, sedangkan capaian target tersebut adalah 388,23% yang mana sangat melampaui target, hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Biro Tapem sangat baik. Pada indikator Persentase kepemilikan dokumen kependudukan memiliki target 87,97%, sedangkan capaian pada target tersebut adalah 99,33% yang juga melampaui target. Tercapainya target pada kedua indikator tersebut bahkan melampaui target, menunjukkan kinerja Biro Tapem pada tahun 2022 sangat baik.

2.2.2 Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah istimewa Yogyakarta dan Pasal 70 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya pada Pasal 23 Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa:

- (1) RLPPD disampaikan oleh kepala daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada pemerintah pusat.
- (2) RLPPD dipublikasikan paling sedikit melalui:
 - a. 3 (tiga) media cetak harian dan/atau media *online*;
 - b. Papan pengumuman yang mudah diakses publik; dan
 - c. *Website* resmi pemerintah daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di DIY didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya Pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang bertujuan memberikan hak pelayanan wajib bagi masyarakat.

Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pedoman pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam pasal tersebut adalah Peraturan Pemerintah

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Sesuai dengan Pasal 4 PP Nomor 2 Tahun 2018 Jenis SPM terdiri atas SPM:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum;
- d. Perumahan rakyat;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Dalam rangka penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM, penanganan isu dan permasalahan SPM Sejak Tahun 2018 telah dibentuk Tim Penerapan SPM di DIY. Pada Tahun 2020, dalam rangka penerapan SPM di DIY, Pemda DIY telah menyusun Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Istimewa Yogyakarta agar penerapan SPM di DIY dengan telah diundangkannya Pergub DIY Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan SPM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan berlakunya Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 yang mengganti Permendagri 100 Tahun 2018 yang mengamanatkan untuk pendataan dan pelaporan SPM dengan format yang telah ditentukan maka telah dilaksanakan sosialisasi kepada OPD terkait. Pada Tahun 2022 ditebitkan Surat Gubernur kepada OPD pengampu SPM agar OPD pengampu SPM segera melaksanakan Pendataan sesuai dengan Form-Form Tahapan Penerapan SPM yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 dan hasilnya dilaporkan melalui aplikasi penerapan SPM secara triwulan.

Pada Tahun 2022 juga telah disusun dan diterbitkan Peraturan Gubernur Rencana Aksi SPM yaitu Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2027 yang diundangkan pada Tanggal 5 September 2022. Pergub Renaksi SPM telah memuat target kinerja dan program/kegiatan/sub kegiatan beserta anggarannya untuk pemenuhan indikator SPM Tahun Anggaran 2023-2027. Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan konkuren yang diselenggarakan Pemerintahan Daerah DIY terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib sebagaimana disebutkan dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan sebagai urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki DIY, baik yang telah maupun yang akan dikelola, yang memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren, Pemerintah Daerah juga menyelenggarakan urusan Keistimewaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Urusan Keistimewaan adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, pada tahun 2022 Pemerintah Daerah DIY melalui Biro Tata Pemerintahan Setda DIY telah melaksanakan fasilitasi usulan Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu (PAW) anggota DPRD sebanyak 3 (tiga) usulan peresmian (SK) diantaranya yaitu PAW anggota DPRD Kota Yogyakarta a.n. Agusnur - Nur Anita Owiwanti P, anggota DPRD DIY a.n. Sudarto - Reda Refitra S, dan anggota DPRD Kabupaten Bantul a.n. Timbul H - Purwana.

Selanjutnya terkait berakhirnya masa jabatan Bupati-Wakil Bupati Kulon Progo dan Walikota-Wakil Walikota Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2017-2022 pada 22 Mei 2022, berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 dan 2023, maka diangkat Penjabat Kepala Daerah sampai dengan terpilihnya Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024. Berkenaan dengan hal

tersebut, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melantik dua Penjabat Kepala Daerah yaitu Penjabat Bupati Kulon Progo (Drs. Tri Saktiyana, M.Si.) dan Penjabat Walikota Yogyakarta (Sumadi, S.H., M.H.) pada hari Minggu, 22 Mei 2022 dimana Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sebagai koordinator rangkaian pelantikan tersebut.

Selain itu, dalam rangka menyongsong Pemilu tahun 2024, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY melalui Bagian Pemerintahan Umum menyelenggarakan sosialisasi tahapan Pemilu 2024 di kalurahan/kelurahan di 8 (delapan) kapanewon/kemantren di DIY. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman dan informasi terkait regulasi terkait Pemilu 2024 kepada masyarakat dilihat. Melalui sosialisasi ini juga masyarakat dapat berdialog dengan Komisi A DPRD DIY, KPU, Bawaslu baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk membahas hal-hal seputar Pemilu 2024.

Dalam aspek Kerja sama, Pemerintah Daerah DIY telah melakukan berbagai kerja sama baik antar daerah, dengan pihak ketiga, ataupun kerja sama daerah sebagai bentuk sinergi dengan pemerintah pusat. Pada tahun 2022 Pemda DIY telah melakukan kerja sama antar daerah dalam bentuk 6 (enam) Kesepakatan Bersama dan 10 (sepuluh) Perjanjian Kerja sama. Pemerintah Daerah DIY juga telah melaksanakan kerja sama dengan Pihak Ketiga melalui 7 (tujuh) Kesepakatan Bersama dan 8 (delapan) Perjanjian Kerja Sama. Selain itu Pemda juga telah melakukan kerja sama sebagai bentuk sinergi dengan Pemerintah Pusat dengan total terdapat 19 hasil yang terdiri dari Nota Kesepakatan, Perjanjian Kerja sama, dan Rencana Kerja. Setiap daerah memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Oleh sebab itu, maka perencanaan pembangunan suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter daerah masing-masing. Misalnya karakteristik di bidang: ekonomi, sosial dan budaya daerah itu sendiri. Hal ini memerlukan komitmen bersama setiap stakeholder, sangat penting karena sering kali kerja sama berhenti hanya sebatas penandatanganan kesepakatan bersama ataupun perjanjian kerja sama. Menentukan calon pihak yang akan diajak bekerja sama sebagai upaya pendalaman terhadap kemungkinan objek-objek kerja sama yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.

Sesuai pasal 5 dalam Peraturan Menteri Dalam Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, dinyatakan bahwa dalam menyelenggarakan kerja sama, daerah wajib

melakukan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjakan samakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah. Hal tersebut perlu segera dikoordinasikan oleh perangkat daerah di Tahun 2023, dengan lebih mengaktifkan peran Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) yang bertindak selaku Koordinator yang diharapkan mampu melaksanakan semua program kerja yang telah disusun dalam upaya peningkatan efektivitas kerja sama daerah dan mampu mengakomodir semua kepentingan para pihak. Di Tahun 2024 diharapkan identifikasi dan pemetaan tersebut dapat termuat dalam daftar rencana program dan kegiatan untuk setiap urusan pemerintahan, berdasarkan jangka waktu dan skala prioritas.

Pada pelaksanaan Pembinaan Batas Daerah, Pemerintah Daerah DIY melalui Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sejak tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan sinkronisasi garis batas daerah antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan tersebut sebagai tindaklanjut dari kebijakan Satu Peta Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 jo. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Adapun progres tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.10 Progres sinkronisasi garis batas di DIY

No	Segmen Batas		Keterangan
	DIY	Jateng	
1.	Kab. Kulon Progo	Kab. Purworejo	Proses pembahasan dan penelaah di Kemendagri
2.	Kab. Sleman	Kab. Klaten	Proses pembahasan dan penelaah di Kemendagri
3.	Kab. Gunungkidul	Kab. Klaten	Proses pembahasan dan penelaah di Kemendagri
4.	Kab. Gunungkidul	Kab. Sukoharjo	Usulan revisi telah disampaikan ke Kemendagri pada November 2022
5.	Kab. Gunungkidul	Kab. Wonogiri	Proses pembahasan di daerah
6.	Kab. Kulon Progo	Kab. Magelang	Proses pembahasan di daerah
7.	Kab. Sleman	Kab. Magelang	Proses pembahasan di daerah

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2022

Hasil dari sinkronisasi garis batas tersebut adalah usulan revisi Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah, dimana Permendagri batas tersebut mempunyai lampiran peta skala 1:100.000. Dengan lampiran peta skala 1:100.000 menimbulkan permasalahan karena skala yang terlalu kecil sehingga tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Pada tahun 2024 ditargetkan sinkronisasi garis batas DIY – Jateng dapat terselesaikan semua untuk 7 (tujuh) segmen batas, dimana pada tahun 2023 menargetkan 2 (dua) segmen batas yaitu segmen batas Kab. Gunungkidul – Kab. Wonogiri dan segmen batas Kab. Kulon Progo – Kab. Magelang.

Tabel 2. 11 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Otonomi Daerah Tahun 2022

Indikator	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	Realisasi %		
Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang direspon dengan kebijakan	%	100	100	388,23	388,23	100	388,23

Sumber: e-sakip <http://monevaphd.jogjaprov.go.id>, 2022

Pada Sub Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, dan Kerja sama memiliki indikator kinerja persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan. Dengan formulasi perhitungan jumlah dinamika penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan (Perda, Pergub, SE) tahun berjalan dibagi jumlah dinamika penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, dan kerja sama yang sudah teridentifikasi (target 17 rumusan bahan kebijakan) dikali 100%. Melalui formulasi tersebut, capaian kinerja sebesar 388,23%, dimana terdapat 66 bahan rumusan kebijakan untuk merespon dinamika penyelenggaraan otonomi daerah dan kejelasan urusan pemerintahan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pemerintah kabupaten/kota. Indikator kinerja Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang direspon dengan kebijakan bersifat kumulatif, artinya ketercapaian indikator ini berdasarkan jumlah kumulatif kebijakan yang dihasilkan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas dan Fungsi

A. Tugas

Biro Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, kependudukan, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

B. Fungsi

1. Penyusunan program kerja;
2. Penyiapan bahan kebijakan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kependudukan, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kependudukan, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. Pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kependudukan, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
5. Fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah;
6. Fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan anggota DPRD;
7. Fasilitasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Daerah;
8. Perumusan kebijakan strategis urusan keistimewaan bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
9. Fasilitasi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;

10. Fasilitasi penyelenggaraan dan pembinaan Pemerintah Daerah, Desa dan Kelurahan;
11. Penyiapan bahan koordinasi instansi vertikal;
12. Fasilitasi dan pengoordinasian hubungan antar Pemerintah Daerah;
13. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
14. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan evaluasi otonomi Daerah;
15. Pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya guna mencapai misi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik selama lima tahun terakhir.

Permasalahan-permasalahan selama pelaksanaan Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 2022-2027 dipetakan berdasarkan bagian-bagian pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, yaitu pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama, bina pemerintahan kalurahan/kelurahan dan kapanewon/kemantren, dan bina administrasi kependudukan.

a. Pemerintahan Umum

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Gubernur No. 68 Tahun 2020 tentang Pedoman Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, Dan Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di kabupaten/kota. Hal tersebut menyebabkan masih terjadinya pengajuan permohonan peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antarwaktu yang belum lengkap persyaratannya.
- 2) Belum sesuai Batas daerah antara DIY dengan Jawa Tengah yang diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 memiliki lampiran peta dengan skala 1:100.000 yang mana berpotensi adanya ketidaksesuaian garis di dalam peta dengan kondisi di lapangan yang dapat menimbulkan kerawanan pada wilayah yang saling berbatasan terutama pada titik-titik yang memiliki potensi ekonomi.
- 3) Belum efektifnya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan di DIY. Hal ini mengakibatkan terjadinya

tumpang tindih baik pada pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun penggunaan dana yang dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten/kota.

- 4) Kurangnya pemahaman pemerintah Kabupaten / Kota tentang Peraturan Gubernur DIY nomor 68 Tahun 2020 tentang Pedoman Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, mengingat masih terdapat ketidaksesuaian syarat kelengkapan saat verifikasi.
- 5) Belum adanya pendetailan garis batas Kabupaten/Kota dengan skala yang lebih besar. Merujuk Permendagri Nomor 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah disebutkan bahwa “Pada kondisi tertentu (misalnya titik-titik yang dianggap berpotensi perbedaan pendapat terhadap batas) disyaratkan untuk dibuatkan peta situasi dan digambarkan dengan skala 1 : 1.000”. Selain itu pendetailan garis batas tersebut juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, dimana disebutkan bahwa salah satu rencana aksi percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta adalah penyediaan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 5.000.

b. Otonomi Daerah dan Kerjasama Dalam Negeri

- Permasalahan LPPD
 1. Pada Konten/Substansi kinerja urusan, data capaian kinerja urusan di LPPD masih ada yang belum sesuai dengan definisi operasional yang ada di Manual Pedoman Penyusunan LPPD, adanya perbedaan penafsiran terhadap definisi IKK oleh OPD Pengampu urusan dengan Kementerian Teknis maupun Kemendagri, tidak semua Indikator Kinerja Kunci (IKK) didukung dengan alokasi anggaran yang memadai. IKK yang tidak didukung dengan perencanaan dan penganggaran berkecenderungan kinerjanya rendah dan adanya data-data anomali sehingga validitasnya dipertanyakan pada saat evaluasi.

2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD sebagian besar belum menjadi indikator/target OPD dan tidak didukung dengan penganggaran program dan kegiatan untuk pencapaiannya.
 3. Masih kurangnya ketersediaan data dukung yang memadai terkait dengan IKK LPPD di OPD, utamanya IKK yang tidak didukung oleh penganggaran tidak menjadi indikator kinerja prioritas sehingga perhitungan/data dukung IKK kurang mendapatkan perhatian oleh OPD.
- Penerapan SPM masih terdapat beberapa kendala diantaranya:
 1. Pendataan SPM Tahun 2022 masih belum valid atau belum lengkap sesuai dengan format dalam permendagri Nomor 59/2021 sehingga belum dapat digunakan dalam penentuan target maupun penghitungan kebutuhan.anggarannya. Data yang masih belum lengkap diantaranya adalah data by name by address yang diakses dari data kependudukan dengan adanya kebijakan SIAK terpusat dan pembatasan akses data kependudukan oleh Ditjen Dukcapil maupun akses data dari PDAM khususnya Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Pendidikan dan Bidang Sosial;
 2. Adanya kesulitan dalam penentuan target karena data yang bersifat dinamis misalnya penerima layanan bidang kesehatan dan target yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya misalnya SPM Bidang Perumahan yaitu penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana.
 3. Pada Tahun Anggaran 2022 masih terdapat ketidaksesuaian nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan untuk pemenuhan SPM dengan nomenklatur yang tercantum di dalam Aplikasi Laporan SPM Bangda (e-SPM)/Permendagri 59 Tahun 2021 khususnya urusan Bidang Pendidikan karena perbedaan pengaturan dengan Permendagri 90 Tahun 2019 serta pemutakhirannya;
 4. Tidak semua nomenklatur kegiatan/sub kegiatan untuk pemenuhan SPM yang tercantum di dalam aplikasi pelaporan SPM dapat dianggarkan karena berdasarkan pemetaan oleh daerah memang tidak diperlukan.

5. Persentase dukungan pendanaan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada umumnya masih sangat kecil jika dibandingkan dengan anggaran Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Masih kurangnya dukungan pendanaan SPM Bidang Perumahan baik untuk penyediaan/rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana maupun penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi sehingga yang dapat dilaksanakan hanya sebatas pendataan saja;
 7. Masih banyak program/kegiatan/sub kegiatan untuk pemenuhan SPM yang didanai/bergantung pada anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Dana BOS (Biaya Operasional Sekolah), Dana BOK (Biaya Operasional Kesehatan) maupun DAK lainnya yang jumlah maupun ketersediaannya tergantung dari alokasi/kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.
 8. Belum optimalnya koordinasi dan komunikasi baik di internal OPD, Tim SPM, maupun sinergitas lintas sektor termasuk dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kemendagri maupun Kementerian Teknis/Lembaga Pembina.
 9. Masih kurangnya peran serta masyarakat di dalam pencapaian target SPM terutama SPM Kesehatan
 10. Belum adanya persamaan persepsi terhadap konsep pemenuhan regulasi teknis (Perda/Perkada) terkait pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar misalnya perlu tidaknya pengaturan mengenai bantuan bagi masyarakat yang terdampak akibat penegakan Perda/Perkada untuk pemenuhan indikator pelayanan tramtibus.
- Kerja Sama Dalam Negeri
 1. Perangkat daerah belum sepenuhnya mengimplementasikan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang dapat dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah.
 2. Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama, sehingga belum bisa diketahui efektivitas kerja sama yang dilaksanakan.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan upaya-upaya nyata oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diantaranya:

1. Bersama perangkat daerah terkait yang telah melakukan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang dapat dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan perangkat daerah terkait dan Mitra kerja sama baik secara daring maupun luring.

c. Bina Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Masih terdapat penduduk yang kurang memiliki kesadaran atas pentingnya tertib administrasi kependudukan, sehingga dokumen yang dimiliki belum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena penduduk tersebut tidak melaporkan peristiwa kependudukan ataupun peristiwa penting yang dialami. Pada hakikatnya penduduk yang tidak memperbarui dokumen kependudukan akan mengalami hambatan dalam memperoleh pelayanan dasar seperti bantuan sosial.
2. Meskipun pemangkasan prosedur pelayanan administrasi kependudukan dan pengalihan metode pelayanan menjadi online telah berjalan namun belum semua penduduk memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi sehingga antrean pemohon di kantor penyedia layanan administrasi kependudukan masih sering ditemui.
3. Masih terdapat lembaga penyedia layanan publik yang belum menyadari pentingnya verifikasi dan validasi dokumen berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Padahal Kementerian Dalam Negeri dan jajaran Dinas Dukcapil di daerah telah membuka akses seluas-luasnya bagi lembaga/instansi yang memerlukan akses data kependudukan untuk kepentingan pelayanan publik.
4. Belum adanya database yang terintegrasi terkait jumlah penduduk rentan administrasi kependudukan seperti penghuni panti, transpuan, gelandangan, dan ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) sehingga menjadi kendala tersendiri bagi Pemda DIY dalam memberikan fasilitasi kepada penduduk rentan administrasi kependudukan untuk memiliki dokumen kependudukan. Hal ini berimplikasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi kepemilikan dokumen

kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan yang cenderung parsial atau hanya berdasarkan pengaduan dan laporan masyarakat.

5. Penuntasan perekaman biometrik dan pencetakan KTP-el bagi calon pemilih pemula sebelum Pilkada Serentak dan Pemilu 2024 menjadi tantangan besar bagi jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah. Sebab untuk dapat menyelesaikan tugas tersebut, perlu sering diselenggarakan pelayanan “jemput bola” ke sekolah-sekolah dan kelurahan. Tingginya target perekaman pemilih pemilu juga tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya yang memadai sehingga instansi pelaksana di kabupaten/kota perlu meningkatkan layanan jemput bola tersebut di samping tetap membuka layanan perekaman di kantor sedangkan peralatan rekam dan personil terbatas.
6. Pemerintah pusat menginstruksikan kepada daerah untuk semakin meningkatkan cakupan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sedangkan aplikasi dimaksud masih belum dapat digunakan pada layanan-layanan publik seperti bank, perpajakan, dlsb.
7. Instansi pelaksana di kabupaten/kota perlu proaktif untuk melaporkan apabila ada kebutuhan fasilitasi terkait itsbat nikah sehingga provinsi dapat mengintervensi serta memperbanyak kerja sama dengan instansi pelaksana perkawinan untuk semakin mengakurasi pencatatan perkawinan.
8. Beberapa instansi masih memerlukan data BNBA untuk dapat menjalankan layanannya namun saat ini daerah sudah tidak memiliki kontrol terhadap database kependudukan karena sudah terpusat di Ditjen Dukcapil Kemendagri dan instansi di daerah dipersilakan memanfaatkan data kependudukan melalui mekanisme kerja sama pemanfaatan data. Perjanjian kerja sama (PKS) juga memiliki tantangan tersendiri dimana instansi yang akan menjalin kerja sama perlu memiliki sertifikasi keamanan data setingkat ISO 27001. Ke depannya selain mendorong kerja sama pemanfaatan data juga perlu mensosialisasikan ISO 27001 bagi instansi yang akan mengadakan PKS padahal antusiasme instansi daerah terhadap PKS tanpa adanya ISO 27001 masih terbilang rendah.

d. Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren

1. Dari segi kinerja anggaran, jika dilihat dari rasio realisasi belanja Dana Desa dan rasio realisasi belanja APBKal masih ada Kalurahan dengan kinerja anggaran yang kurang baik dan jika ditilik dari rasio kemandirian pendapatannya, Kalurahan masih mengandalkan sumber pembiayaan dari lembaga supra-desa.
2. Kompetensi aparatur pemerintahan kalurahan merupakan ujung tombak kemajuan pemerintah desa, namun saat ini kapasitas SDM aparatur kalurahan di DIY masih tergolong rendah. Hal ini bisa dilihat dari data rata-rata pendidikan SDM aparatur kalurahan tahun 2021 yang didominasi lulusan SMA dengan rentang usia 40-60 tahun.
3. Saat ini seluruh kantor kalurahan di DIY yaitu sebanyak 392 kalurahan sudah terkoneksi dengan internet, namun kualitas jaringannya masih terbatas. Hal tersebut berdampak pada tidak optimalnya penerapan teknologi informasi di kalurahan yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik yang efektif dan efisien.
4. Masih rendahnya kualitas perencanaan pembangunan di kalurahan, hal ini terlihat dari masih banyaknya pemerintah kalurahan dengan paradigma pembangunan yang hanya fokus pada pembangunan infrastruktur. Sehingga perencanaan pembangunan yang partisipatif dan responsif menjadi terabaikan.
5. Belum ada pengukuran kinerja Pemerintah Kalurahan yang mudah dipahami, dilaksanakan, terpola dan terukur untuk mendapatkan penilaian kinerja Pemerintah Kalurahan.
6. Belum jelasnya status aparatur kalurahan, kualifikasi dan kompetensi jabatan, belum adanya analisis jabatan dengan kriteria alokasinya, database lembaga dan kelompok masyarakat yang kurang valid serta belum adanya *reward* dan *punishment*.
7. Masalah tata kelola keuangan yang bertitik fokus permasalahan pada manajemen keuangan belum transparan dan akuntabel, ketiadaan kinerja dalam penganggaran, akuntabilitas kinerja yang rendah, ketidakefisien dalam operasi, proses dan prosedur dalam penatausahaan keuangan dan pendapatan masih kecil tetapi kebutuhan bulanannya besar.
8. Masalah sumber daya manusia dengan beberapa permasalahan, yaitu belum jelasnya status aparatur kalurahan, kualifikasi dan kompetensi jabatan, belum adanya analisis

jabatan dengan kriteria alokasinya, database lembaga dan kelompok masyarakat yang kurang valid serta belum adanya reward dan punishment.

9. Masalah regulasi atau aturan main yang disusun oleh Kalurahan belum harmonis dengan peraturan perundang-undangan terkait, tumpang tindih antar peraturan, peraturan yang berorientasi pada prosedur saja dan belum berorientasi pada hasil, adanya beberapa peraturan yang kurang mendukung adanya reformasi Kalurahan, serta ketidakjelasan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* dalam organisasinya.
10. Masalah nilai dan budaya yang terkait dengan permasalahan kurangnya motivasi kerja dari aparatur kalurahan, masih adanya sikap yang pro status quo, ketiadaan *sense of leadership*, dan masih banyak yang belum disiplin.

Identifikasi berbagai permasalahan Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dapat dipetakan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.12 Permasalahan RB Kalurahan

No.	Permasalahan	Penjabaran Masalah
1.	Masalah keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen keuangan • (Ketiadaan) fokus kinerja dalam penganggaran • Akuntabilitas kinerja rendah • Ketidakefisienan dalam sistem operasi, proses, dan prosedur • Pendapatan kecil tapi kebutuhan belanja besar
2.	Masalah SDM	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kualifikasi dan kompetensi jabatan; ➤ Analisa jabatan ➤ Kriteria alokasi; ➤ Database: lembaga, kelompok masyarakat kurang valid
3.	Masalah regulasi/aturan main	<ul style="list-style-type: none"> • Kejelasan SOP internal organisasi; • Tumpang-tindih antar peraturan; • Peraturan yang berorientasi prosedur dibandingkan hasil; • Peraturan yang bersifat negatif.
4.	Masalah nilai dan budaya	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Motivasi rendah; ➤ Pro status-quo; ➤ Ketiadaan sense of leadership; ➤ Mudah melanggar aturan.

(Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2022)

Teknologi informasi merupakan salah satu sarana yang belum dapat dioptimalkan penggunaannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik oleh kalurahan. Selain itu, adanya permasalahan kemampuan kapasitas sumber daya manusianya yang belum menguasai teknologi informasi yang mumpuni, serta permasalahan teknis dalam pemanfaatannya juga belum dapat tersentuh dengan optimal. Baru sedikit contoh dimana kalurahan di DIY sudah dapat mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi antara lain Kalurahan Pleret di Kabupaten Bantul.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tusi SKPD

A. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

Dalam upaya pencapaian target penyelenggaraan administrasi kependudukan, isu-isu strategis yang ditemui antara lain:

1. Optimalisasi peran aparat pemerintahan untuk meningkatkan kesadaran penduduk melaporkan peristiwa kematian.
2. Optimalisasi fasilitasi penerbitan dokumen administrasi kependudukan bagi penduduk rentan, seperti penyandang disabilitas, transgender, anak tidak diketahui asal-usul, dan lansia.
3. Mendorong pemanfaatan data kependudukan bagi penyelenggaraan program kegiatan di OPD/lembaga pengguna.
4. Meningkatkan kualitas data kependudukan melalui pemutakhiran data dan perekaman biometrik pemilih pemula dalam rangka penyiapan data pemilih Pemilu dan Pilkada.

B. Unsur penunjang urusan pemerintahan

a. Pembinaan Batas Daerah

1. Pembangunan di wilayah perbatasan belum menjadi program prioritas pemerintah daerah.
2. Pembangunan wilayah perbatasan sangat diperlukan guna meningkatkan pemberian pelayanan dasar serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
3. Belum adanya *grand design* perencanaan pembangunan di wilayah perbatasan.

4. Belum optimalnya Tim Pembangunan Wilayah Perbatasan sesuai mandat pasal 13 ayat (2) Perda No 3 Tahun 2020.
5. Belum adanya aturan pelaksanaan pembangunan wilayah perbatasan sesuai mandat Perda No 3 Tahun 2020 Pasal 40.
6. Belum selarasnya perencanaan pembangunan di wilayah perbatasan.

b. Pemerintahan umum

1. Pemberhentian antarwaktu anggota DPRD karena meninggal dunia, diberhentikan maupun mengundurkan diri yang harus difasilitasi dan dikoordinasikan pengusulan dan proses legalitas administrasinya.
2. Regulasi yang belum memadai terkait Pilkada serentak 2024, regulasi tersebut akan disosialisasikan ke level pemerintah kabupaten/kota di DIY dan menjadi dasar beberapa kebijakan di level DIY maupun kabupaten/kota.
3. Pemilihan legislatif di tahun 2024 yang akan mengakibatkan proses administrasi baru bagi anggota legislatif di DIY yang terpilih pada Pileg 2024 dan perlu difasilitasi dan dikoordinasikan.
4. Pengoordinasian multi sektor yang masih kurang optimal terkait trantibum linmas dan kesbangpol.
5. Belum terpolanya dengan optimal koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait di Pemerintah kabupaten/Kota.
6. Belum terpolanya evaluasi urusan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan kesatuan bangsa dan politik.

c. Pemerintahan Kalurahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian maka Desa (di DIY disebut Kalurahan) adalah subjek dan sekaligus ujung tombak

pembangunan. Namun dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan pelaksanaan pembangunan di Kalurahan di DIY masih mengalami beberapa permasalahan, antara lain:

1. Belum optimalnya keselarasan dan harmonisasi kebijakan serta regulasi terkait Kalurahan dan/atau yang menyangkut ke Kalurahan.
2. Belum ada kajian terkait dengan struktur organisasi/ kelembagaan yang ada di Kalurahan apakah mampu mendukung penerapan organisasi berbasis kinerja (*Performance Based Organization*).
3. Secara kuantitas 392 Kalurahan di DIY telah terkoneksi internet, namun kualitas koneksi belum optimal karena berbasis WIFI, sehingga belum memadai untuk mendukung transformasi digital di Kalurahan (persuratan, arsip, pelayanan publik, berbagai aplikasi/sistem informasi yang berada dan/atau menyangkut ke Kalurahan).
4. Belum updatenya data Lurah dan Pamong Kalurahan serta staf Kalurahan se-DIY untuk bisa melakukan profiling, memudahkan dalam melakukan fungsi analisis dan pembinaan pengawasan Lurah, Pamong dan staf Kalurahan.
5. Hambatan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu hambatan internal berupa masalah aparat/staf baik dari segi kuantitas maupun dalam hal kualitas sumber daya manusia aparatur Pemerintah Kalurahan.
6. Banyaknya program kegiatan yang masuk di Kalurahan belum secara optimal melalui kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik.
7. Belum ada pengukuran kinerja Pemerintah Kalurahan yang mudah dipahami, dilaksanakan, terpola dan terukur untuk mendapatkan penilaian kinerja Pemerintah Kalurahan.
8. Dari segi kinerja anggaran, jika dilihat dari rasio belanja Dana Desa dan rasio realisasi belanja APBKal masih ada Kalurahan dengan kinerja anggaran yang kurang baik dan jika ditilik dari rasio kemandirian pendapatannya, Kalurahan masih mengandalkan sumber pembiayaan dari lembaga supra-desa.
9. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY perihal Reformasi Kalurahan (diterjemahkan kalurahan secara luas, meliputi pemerintah, lembaga-

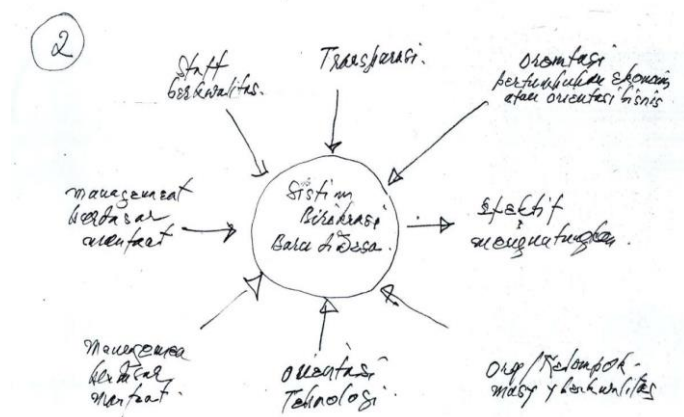
lembaga kemasyarakatan, serta aspek pemberdayaan masyarakat), perlu direspon dengan penguatan kapasitas lembaga Pemerintah Kalurahan, agar lincah dan adaptif dalam mengenali potensi wilayahnya serta menjalankan pemberdayaan warganya secara teknokratis. Tujuannya agar Pemerintah Kalurahan mampu mendorong berkembangnya organisasi/kelompok masyarakat yang berkualitas. Kemudian arahan Gubernur DIY perihal semangat reformasi birokrasi diharapkan terimplementasi hingga kalurahan untuk peningkatan pelayanan publik dan sikap pelayanan prima aparatur memerlukan SDM Pamong Kalurahan yang berkualitas dan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Namun di sisi lain, Pemerintah Kalurahan masih memiliki permasalahan/keterbatasan pada sisi keuangan, SDM, regulasi atau aturan main, serta permasalahan nilai dan budaya.

10. Manajemen birokrasi pemerintahan kalurahan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 lebih banyak diatur oleh Pemerintah Kabupaten, mulai dari pedoman penyusunan regulasi Pemerintah Kalurahan, pedoman perencanaan pembangunan, penetapan alokasi pembiayaan, hingga pemberian sanksi kepada Lurah. Hal ini tentu harus menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan Reformasi Birokrasi Kalurahan, yakni dengan memperhatikan pembagian peran/kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah.
11. Perlu dilakukan perbaikan mendasar penyelenggaraan pemerintahan kalurahan terutama menyangkut permasalahan berikut: (1) pengelolaan keuangan; (2) sumber daya manusia; (3) regulasi; dan (4) nilai dan budaya. Reformasi Birokrasi Kalurahan dikembangkan untuk mewujudkan birokrasi pemerintah kalurahan yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Dikaitkan dengan perencanaan strategis daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2022 - 2027, reformasi birokrasi kalurahan adalah langkah strategis dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah kalurahan untuk lebih berperan dalam

meningkatkan: (i) kualitas hidup-kehidupan-penghidupan warga, (ii) pembangunan yang inklusif, serta (iii) pengembangan kebudayaan.

Sri Sultan HB X sebagai Gubernur DIY menekankan perlunya melakukan reformasi birokrasi kalurahan dengan semangat untuk cepat dan tepat melayani, dan terimplementasi sampai kalurahan agar masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi, perbaikan layanan, dan sikap kerja pelayanan prima dari aparatur. Arahan Gubernur DIY terhadap sistem birokrasi pemerintah kalurahan baru digambarkan dalam bagan berikut:

Gambar 2.1 Sistem Birokrasi Pemerintah Kalurahan



Secara lebih rinci bagan tersebut dijelaskan dalam uraian sebagai berikut:

a) Birokrasi kalurahan yang transparan.

Harapan terhadap birokrasi yang transparan, yakni bersih dan akuntabel diwujudkan dalam pengelolaan keuangan di kalurahan yang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Birokrasi yang bersih dan akuntabel juga diwujudkan dengan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah kalurahan dan program/kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara terukur.

b) Pamong kalurahan yang berkualitas.

Sumber daya manusia pamong kalurahan yang kompeten dan mampu beradaptasi dengan cepat merespon perubahan dan tuntutan

masyarakat seiring peningkatan yang sangat signifikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

- c) Pemerintah kalurahan yang mampu mendorong berkembangnya organisasi/kelompok masyarakat yang berkualitas.

Pemerintah kalurahan mampu membuka ruang dan mendorong keterlibatan organisasi/kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah kalurahan sebagai aktor kunci mampu berperan menciptakan sinergi pelaksanaan pembangunan, baik dengan masyarakat maupun dengan dunia usaha.

- d) Pengelolaan anggaran kalurahan yang efektif, efisien dan menguntungkan.

Penganggaran kalurahan dirancang melalui kebijakan yang terarah dan disupport oleh perencanaan yang matang mengutamakan prinsip efektifitas, efisiensi, dan pengambilan keputusan yang paling menguntungkan bagi masyarakat kalurahan.

- e) Pembangunan kalurahan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.

Terdapat komitmen yang kuat dari pemerintah kalurahan melalui program kegiatan yang mengarah pada terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dicirikan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.

- f) Manajemen kinerja kalurahan berdasarkan manfaat.

Terdapat peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah kalurahan, terutama keterkaitan antara input anggaran dengan kinerja organisasi dan orientasi kegiatan yang lebih fokus pada hasil yang diharapkan dan dampak kemanfaatan yang ditimbulkan terhadap masyarakat kalurahan baik secara langsung maupun tidak langsung.

- g) Manajemen pemerintahan kalurahan yang berorientasi teknologi

Penerapan e-government berupa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berjalan secara efektif, efisien,

terintegrasi dan merata pada seluruh Pemerintah Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

h) Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Kondisi yang diharapkan adalah meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kalurahan. Meningkatnya kepuasan masyarakat menandakan bahwa pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan sesuai dengan harapan, baik dari sisi prosedur maupun aparatur.

d. Otonomi Daerah dan Kerjasama

Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan diketahui bahwa Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pelayanan Dasar SPM masih menemui berbagai kendala dan permasalahan sebagai berikut:

1. Penerapan SPM masih terkendala belum terintegrasinya SPM di dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk itu perlu segera dilaksanakan integrasi SPM di dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Format pendataan Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal masih belum dapat dipenuhi oleh OPD Pengampu SPM.
3. Masih perlunya fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selain itu untuk kerjasama memiliki beberapa isu strategis, yakni:

1. Belum semua kerja sama dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan perangkat daerah terkait dan Mitra kerja sama baik secara daring maupun luring.
2. Belum semua Komponen Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerja sama dilakukan pemerintah kabupaten/kota.
3. Identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang dapat dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah.

Berikut adalah beberapa langkah untuk menindaklanjuti isu-isu penting di atas yang dilakukan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY:

1. Peningkatan pengelolaan pemerintahan secara efektif dan efisien.
 - a. Harmonisasi hubungan antar pemerintah daerah sangat berkaitan erat dengan pengelolaan dan penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan antar pemerintah daerah. Disamping itu peningkatan kerja sama antar daerah juga dapat seiring sejalan dengan terselesaikannya permasalahan di wilayah perbatasan tersebut.
 - b. Upaya-upaya penegasan batas wilayah diantaranya melalui pemeliharaan pilar dan papan batas serta pemahaman/sosialisasi tentang Permendagri yang mengatur tentang batas wilayah sehingga aparat maupun masyarakat paham mengenai batas wilayah perbatasan secara administratif, bukan yang ditandai dengan kenampakan alam saja.
2. Selain batas luar dengan Provinsi Jawa Tengah, batas antar Kabupaten/Kota di DIY juga sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan skala lampiran peta yang berbeda-beda yaitu 1:40.000, 1:25.000, 1:10.000 dan 1:18.000. Dengan skala peta yang masih kecil dan belum seragam tersebut menyebabkan pada area-area tertentu terutama di wilayah strategis dan berpotensi ekonomi ditemukan permasalahan karena batas daerah yang berdasarkan garis pada peta tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Garis batas yang diatur dalam Permendagri tersebut juga dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan juga Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dengan penggambaran sampai peta bidang/persil tanah yang idealnya menggunakan peta skala besar minimal 1:5.000. Selain itu, pesatnya pembangunan di wilayah perkotaan membuat garis batas pada peta banyak memotong obyek bangunan, baik rumah warga atau bangunan lainnya. Ketidakpastian garis batas menyebabkan masyarakat yang tinggal di sekitar garis batas mengalami kesulitan dalam mengakses layanan publik yang berbasis wilayah, seperti pengurusan dokumen kependudukan, surat izin mendirikan bangunan (IMB), pengajuan izin usaha melalui Online Single Submission (OSS) serta permasalahan berbasis kewilayahan lainnya.
3. Koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan baik di internal Pemda DIY maupun dengan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Pusat.

4. Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota dan peningkatan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat.
5. Meningkatkan koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten/kota bagian pemerintahan, serta tim verifikasi dilingkup Sekretariat Daerah provinsi terkait Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD DIY/Kabupaten dan Kota.
6. Melakukan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjakan samakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah berupa Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50/KEP/2023 tentang Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 - 2027.
7. Pengembangan sistem informasi dan pembangunan database pemerintahan berbasis teknologi informasi menjadi hal yang harus segera ditindaklanjuti di era kemajuan teknologi seperti sekarang ini. Untuk itu adopsi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terus menerus ditingkatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan tepat. Namun demikian mengingat nilai dari data khususnya data kependudukan yang begitu esensial, penggunaan teknologi informasi harus tetap memperhatikan keamanan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
 - a. Pelaksanaan Pemilu yang semakin dekat perlu segera didukung dengan ketercapaian jumlah penduduk yang berpotensi menjadi pemilih melalui perekaman biometrik supaya memenuhi persyaratan sebagai pemilih pemilu dengan kepemilikan KTP-el.
 - b. Inovasi identitas kependudukan digital (IKD) yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik serta langkah awal mewujudkan single identity number perlu disosialisasikan secara masif dan ditingkatkan kepemilikannya.
 - c. Kepemilikan akta kelahiran menjadi penting semenjak dijadikan salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan dimana setiap orang yang lahir harus dicatat dan memiliki sertifikat lahir.
 - d. Penduduk dengan status “kawin belum tercatat” terutama untuk perkawinan muslim masih relatif banyak sehingga diperlukan sinergi antara instansi pelaksana admindukcapil dengan instansi pencatat perkawinan muslim.

- e. Cakupan penerbitan akta kematian masih berdasarkan pelaporan mandiri oleh masyarakat sehingga perlu dicari formulasi yang tepat untuk mendapatkan angka kematian secara riil.
- f. Kebutuhan data khususnya data kependudukan bagi perencanaan pembangunan dan pelayanan publik semakin meningkat terutama dalam rangka verifikasi dan validasi untuk membuktikan keabsahan dari data yang diinputkan.
- g. Mengingat berharganya data kependudukan, isu keamanan data menjadi sangat penting. Ditjen Dukcapil Kemendagri sebagai instansi memegang kontrol penuh terhadap data kependudukan menginstruksikan kepada lembaga yang memanfaatkan data kependudukan untuk dapat memenuhi standar keamanan data sesuai dengan ISO 27001.

Pada tahun 2024 khususnya, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yakni:

- a. Belum adanya pendetailan garis batas Kabupaten/Kota dengan skala yang lebih besar. Merujuk Permendagri Nomor 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah disebutkan bahwa “Pada kondisi tertentu (misalnya titik-titik yang dianggap berpotensi perbedaan pendapat terhadap batas) disyaratkan untuk dibuatkan peta situasi dan digambarkan dengan skala 1 : 1.000”. Selain itu pendetailan garis batas tersebut juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, dimana disebutkan bahwa salah satu rencana aksi percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta adalah penyediaan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 5.000.
- b. Kurangnya pemahaman pemerintah Kabupaten / Kota tentang Peraturan Gubernur DIY nomor 68 Tahun 2020 tentang Pedoman Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, mengingat masih terdapat ketidaksesuaian syarat kelengkapan saat verifikasi.
- c. Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD sebagian besar belum menjadi indikator/target OPD dan tidak didukung dengan penganggaran program dan kegiatan untuk pencapaiannya.

- d. Pendataan SPM yang telah dilaksanakan belum menghasilkan data yang lengkap sesuai yang diamanatkan di dalam Permendagri 59 tahun 2022 terutama *data by name by address*.
- e. OPD belum sepenuhnya paham urgensi identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang dapat dikerja samakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah.
- f. Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama, sehingga belum bisa diketahui efektivitas kerja sama yang dilaksanakan.
- g. Tingginya target perekaman pemilih pemilu tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya yang memadai. Instansi pelaksana di kabupaten/kota perlu meningkatkan layanan jemput bola di samping tetap membuka layanan perekaman di kantor sedangkan peralatan rekam dan personil terbatas.
- h. Pemerintah pusat menginstruksikan kepada daerah untuk semakin meningkatkan cakupan kepemilikan IKD sedangkan aplikasi dimaksud masih belum dapat digunakan pada layanan-layanan publik seperti bank, perpajakan, dlsb.
- i. Intansi pelaksana di kabupaten/kota perlu proaktif untuk melaporkan apabila ada kebutuhan fasilitasi terkait itsbat nikah sehingga provinsi dapat mengintervensi serta memperbanyak kerja sama dengan fasilitas kesehatan untuk semakin mengakurasi pencatatan kelahiran dan kematian.
- j. Beberapa instansi masih memerlukan data BNBA untuk dapat menjalankan layanannya namun saat ini daerah sudah tidak memiliki kontrol terhadap database kependudukan karena sudah terpusat di Ditjen Dukcapil Kemendagri dan instansi di daerah dipersilakan memanfaatkan data kependudukan melalui mekanisme kerja sama pemanfaatan data. Perjanjian kerja sama (PKS) juga memiliki tantangan tersendiri dimana instansi yang akan menjalin kerja sama perlu memiliki sertifikasi keamanan data setingkat ISO 27001. Ke depannya selain mendorong kerja sama pemanfaatan data juga perlu mensosialisasikan ISO 27001 bagi instansi yang akan mengadakan PKS padahal antusiasme instansi daerah terhadap PKS tanpa adanya ISO 27001 masih terbilang rendah.
- k. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.
- l. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Berikut merupakan tantangan dan peluang yang dihadapi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY:

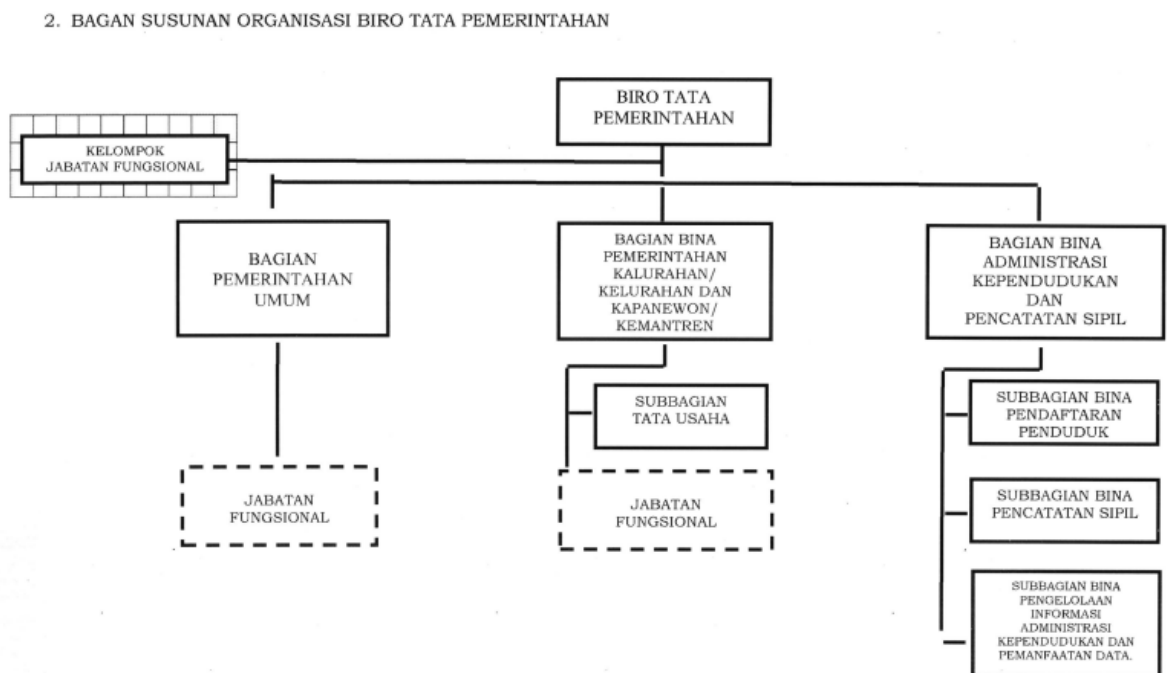
Tantangan

Melihat perkembangan situasi terkini bahwa teknologi informasi mutlak diperlukan dalam percepatan pemerintahan dan percepatan pelayanan kepada masyarakat, maka peluang tersebut sudah semestinya dimanfaatkan oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY untuk merespon hal tersebut dengan baik demi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui beberapa *platform*.

Peluang

Selain itu, terdapat tantangan bagi biro, yakni peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk dapat menangkap maksud kebijakan-kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat dan menerjemahkannya serta membantu memberikan arahan kepada pemerintahan di bawahnya (kabupaten dan kota).

Gambar 2.2 Susunan Organisasi Perangkat Daerah



(Sumber: Pergub DIY Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah)

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada Tahun Anggaran 2024 Biro Tata Pemerintahan pada Ranhir RKPD 2024 merencanakan 9 Program (7 Program APBD Murni, 2 Program Dana Keistimewaan), 19 kegiatan (17 Kegiatan APBD Murni, 2 Kegiatan Dana Keistimewaan), dan 36 subkegiatan (34 Sub kegiatan APBD Murni, 2 Sub kegiatan Dana Keistimewaan) untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Biro Tata Pemerintahan pada khususnya dan Pemerintah Daerah DIY pada umumnya.

Tabel 2. 13 Rencana Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama dalam negeri serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantran	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama dalam negeri, pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren, serta penataan administrasi batas daerah dan toponimi	100%
Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	93,96%
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A

Untuk tahun 2024 Biro Tata Pemerintahan merancang program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator rencana kinerja tahunan di atas. Berikut disampaikan secara singkat review program yang terdapat pada dokumen Rancangan Akhir RKPD 2024 dengan hasil analisis kebutuhan yang ada di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Tabel 2. 14 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN		Persentase rumusan bahan kebijakan penataan administrasi batas daerah dan toponimi	100%	165.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN		Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tersinkronisasi	57%	214.140.000	
Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten		Terselenggaranya penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	100%	165.000.000	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten		Terlaksananya pengelolaan tanah kasultanan, tanah kadipaten yang meliputi aspek penatausahaan, aspek pemeliharaan dokumen, aspek pengawasan	2 Dokumen	214.140.000	
Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	DIY, Jateng	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial,	1 Dokumen	165.000.000	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	DIY, Jateng	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial,	2 Dokumen	214.140.000	

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11
		Dan Kesejahteraan Masyarakat					Dan Kesejahteraan Masyarakat			
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase rumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren	100%	58.000.000	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase rumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren	100%	50.000.000	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100%	58.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100%	50.000.000	
Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	DIY	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	18.000.000	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	DIY	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	50.000.000	

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	
Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	DIY	jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	1 Dokumen	20.000.000	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	DIY	jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	0	0	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	DIY	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	20.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	DIY	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	0	0	
PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Presentase rumusan bahan kebijakan urusan kebudayaan	100%	150.000.000	PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Presentase rumusan bahan kebijakan urusan kebudayaan	0	0	
Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman		Terlaksananya Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	100%	150.000.000	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman		Terlaksananya Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	0	0	
Pembinaan dan Pengembangan	DIY	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan	1 Dokumen	150.000.000	Pembinaan dan Pengembangan	DIY	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan	0	0	

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11
Kesejarahan		dan Pengembangan Kesejarahan			Kesejarahan		Pengembangan Kesejarahan			
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa kependudukan (KTPel dan KIA) bagi masyarakat di DIY	88,75%	209.500.000	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa kependudukan (KTPel dan KIA) bagi masyarakat di DIY	88,75%	136.292.400	
Pelayanan Pendaftaran Kependudukan		Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan pendaftaran kependudukan	100%	88.000.000	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan		Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan pendaftaran kependudukan	100%	58.160.200	
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	DIY	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	80 Dokumen	58.000.000	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	DIY	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	80 Dokumen	28.160.200	
Penyusunan Tata Cara Perencanaan,	DIY	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan,	1 Dokumen	30.000.000	Penyusunan Tata Cara Perencanaan,	DIY	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan,	1 Dokumen	30.000.000	

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11
Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk		Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun			Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk		Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun			
Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	100%	121.500.000	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	100%	78.132.200	
Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	DIY	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	21.500.000	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	DIY	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	21.182.200	
Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	DIY	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	100.000.000	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	DIY	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	56.950.000	

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa penting (Akta kelahiran bagi anak dan Akta kematian) bagi masyarakat di DIY	99,18%	133.000.000	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa penting (Akta kelahiran bagi anak dan Akta kematian) bagi masyarakat di DIY	99,18%	91.970.600	
Pelayanan Pencatatan Sipil		Terlaksananya kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	100%	55.000.000	Pelayanan Pencatatan Sipil		Terlaksananya kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	100%	35.218.000	
Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	DIY	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan	55.000.000	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	DIY	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan	35.218.000	
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi		Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	100%	68.000.000	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi		Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	100%	49.726.600	
Fasilitasi terkait Pencatatan	DIY	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	58.000.000	Fasilitasi terkait Pencatatan	DIY	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	41.998.300	

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11
Sipil					Sipil					
Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	DIY	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	3 Dokumen	10.000.000	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	DIY	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	3 Dokumen	7.728.300	
Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Terlaksananya pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil	100%	10.000.000	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Terlaksananya pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil	100%	7.026.000	
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	DIY	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	10.000.000	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	DIY	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	7.026.000	

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Jumlah instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	2 Instansi/Lembaga	179.500.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Jumlah instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	76%	127.037.000	
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	100%	169.500.000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	100%	127.037.000	
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DIY	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	40.500.000	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DIY	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	38.482.200	
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	DIY	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	2 Dokumen	129.000.000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	DIY	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	2 Dokumen	88.554.800	

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		Tercapaiannya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	100%	10.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		Tercapaiannya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	0	0	
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DIY	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	10.000.000	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DIY	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	0	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Persentase tersusunnya profil kependudukan sesuai standar	100%	75.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Persentase tersusunnya profil kependudukan sesuai standar	100%	69.700.000	
Penyediaan Profil Kependudukan		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan	100%	75.000.000	Penyediaan Profil Kependudukan		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan	100%	69.700.000	

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	DIY	Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	1 Dokumen	75.000.000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	DIY	Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	1 Dokumen	69.700.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,60%	1.707.804.950	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,60%	600.744.650	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	56.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	31.247.200	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	36.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	11.247.200	

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	7.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	7.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	13.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	13.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	48.097.060	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	46.981.060	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	34.716.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	33.600.000	

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.108.840	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.108.840	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	8.272.220	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	8.272.220	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah	12 bulan	12.540.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah	12 bulan	11.400.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12.540.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	11.400.000	

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100%	471.667.890	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100%	335.078.290	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.284.760	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.284.760	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	35.423.740	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	35.423.740	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.683.390	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.683.390	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Biro Tata Pemerintahan Setda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	27.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Biro Tata Pemerintahan Setda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	27.000.000	

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11
	DIY					DIY				
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	12.276.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	15.686.400	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nasional	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	350.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nasional	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	210.000.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	735.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	
Pengadaan	Biro	Jumlah Unit	1 Unit	600.000.000	Pengadaan	Biro	Jumlah Unit	0	0	

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Pemerintahan Setda DIY	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tata Pemerintahan Setda DIY	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			
Pengadaan Mebel	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	Pengadaan Mebel	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	35.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	2.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	2.500.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000	

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	382.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	173.538.100	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	20.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	20.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	190.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	130.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	111.538.100	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	42.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	42.000.000	

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		1. Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah 2. Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah 3. Persentase naskah kerja sama dalam negeri yang terealisasi	100%	21.140.000.000	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		1. Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah 2. Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah 3. Persentase naskah kerja sama dalam negeri yang terealisasi	100%	525.000.000	
Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		Terlaksananya tugas pemerintahan	100%	20.575.000.000	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		Terlaksananya tugas pemerintahan	100%	225.000.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	DIY	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	4 Dokumen	20.175.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	DIY	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	4 Dokumen	175.000.000	
Fasilitasi Penataan Wilayah	DIY, Jateng	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	4 Dokumen	400.000.000	Fasilitasi Penataan Wilayah	DIY, Jateng	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	4 Dokumen	50.000.000	

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	
Pelaksanaan Otonomi Daerah		Terlaksananya Pelaksanaan Otonomi Daerah	100%	315.000.000	Pelaksanaan Otonomi Daerah		Terlaksananya Pelaksanaan Otonomi Daerah	100%	100.000.000	
Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	DIY	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	2 Laporan	315.000.000	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	DIY	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	2 Laporan	100.000.000	
Fasilitasi Kerja Sama Daerah		Terlaksananya fasilitasi kerja sama daerah	100%	250.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Daerah		Terlaksananya fasilitasi kerja sama daerah	100%	200.000.000	
Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Nasiona l	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	2 Dokumen	250.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Nasiona l	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	2 Dokumen	200.000.000	
PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWA AN URUSAN KELEMBAGAA N DAN KETATALAKS ANAAN		Persentase rumusan bahan kebijakan kelembagaan kalurahan	100%	2.650.000.000	PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWA AN URUSAN KELEMBAGAA N DAN KETATALAKS ANAAN		Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik	5,10%	1.980.000.000	

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan		Terlaksananya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan urusan keistimewaan	100%	2.400.000.000	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan		Terlaksananya Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	100%	1.980.000.000	
Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	DIY	Jumlah Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Dibina	2 Dokumen	2.400.000.000	Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	DIY	Jumlah Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Dibina	4 Dokumen	1.980.000.000	
Sarana dan Prasarana Keistimewaan		Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana lembaga pelaksana urusan keistimewaan	100%	250.000.000	Sarana dan Prasarana Keistimewaan		Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana lembaga pelaksana urusan keistimewaan	0	0	

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Target	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	Kota Yogyakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan yang Disediakan	7 Unit	250.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	Kota Yogyakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan yang Disediakan	0	0	
TOTAL				26.467.804.950	TOTAL				3.794.884.650	

Dari rancangan awal program Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yang ada di Rancangan Awal RKPD DIY Tahun 2024 sebesar Rp26.467.804.950,00. Sedangkan setelah dilakukan analisis kebutuhan berdasarkan kondisi (*existing*) saat ini, anggaran Biro Tata Pemerintahan mengalami penurunan pagu sebesar Rp22.672.920.300,00, sehingga pagu sesuai dengan analisis kebutuhan yakni sebesar Rp3.794.884.650,00. Hal tersebut terjadi karena seiring berjalannya waktu, terjadi dinamika dalam pemerintahan dan kelembagaan yang harus segera disikapi dan direspon dalam proses perencanaan dan penganggaran demi penyelenggaraan tata pemerintahan yang optimal responsivitasnya sehingga terdapat kegiatan dan subkegiatan yang dihapuskan serta pengurangan dan penambahan pagu, menyesuaikan dengan ketersediaan dana.

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Tabel 2. 15 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2024 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil

Sedangkan mengenai usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tahun 2024 masih nihil. Namun data tersebut dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedepannya yang dapat dipengaruhi oleh Kebijakan Pimpinan, Perubahan Peraturan Perundang-Undangan atau peraturan lainnya, Kondisi dan situasi politik pusat dan daerah, dan lain-lain.

Tabel 2. 16 Usulan Program dan Kegiatan dan sumber Dana Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tersinkronisasi		57%	214.140.000	Dana Keistimewaan		71%	300.000.000

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksananya pengelolaan tanah kasultanan, tanah kadipaten yang meliputi aspek penatausahaan, aspek pemeliharaan dokumen, aspek pengawasan		2 Dokumen	214.140.000	Dana Keistimewaan		2 Dokumen	300.000.000
2.10.11.5.01.01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat	DIY, Jateng	2 Dokumen	214.140.000	Dana Keistimewaan		2 Dokumen	300.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase rumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren		100%	50.000.000	APBD		100%	64.000.000

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		100%	50.000.000	APBD		100%	64.000.000
2.13.04.1.01.02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	DIY	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	20.000.000
2.13.04.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	DIY	0	0	APBD		1 Dokumen	22.000.000
2.13.04.1.01.05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	DIY	0	0	APBD		1 Dokumen	22.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Presentase rumusan bahan kebijakan urusan kebudayaan		0	0	Dana Keistimewaan		100%	500.000.000

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Jumlah laporan pengelolaan sejarah, bahasa, sastra dan museum		0	0	Dana Keistimewaan		100%	500.000.000
2.22.08.5.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	DIY	0	0	Dana Keistimewaan		1 Dokumen	500.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa kependudukan (KTPel dan KIA) bagi masyarakat di DIY		88.75%	136.292.400	APBD		88.80%	228.700.000
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan pendaftaran kependudukan		100%	58.160.200	APBD		100%	95.000.000
2.12.02.1.01.02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	DIY	80 Dokumen	28.160.200	APBD		80 Dokumen	60.000.000

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dalam Satu Provinsi								
2.12.02.1.01.05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	DIY	1 Dokumen	30.000.000	APBD		1 Dokumen	35.000.000
2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		100%	78.132.200	APBD		100%	133.700.000
2.12.02.1.02.01	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	DIY	1 Laporan	21.182.200	APBD		1 Laporan	23.700.000
2.12.02.1.02.02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	DIY	1 Laporan	56.950.000	APBD		1 Laporan	110.000.000

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa penting (Akta kelahiran bagi anak dan Akta kematian) bagi masyarakat di DIY		99.18%	91.970.600	APBD		99.20%	151.300.000
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil		100%	35.218.000	APBD		100%	60.500.000
2.12.03.1.01.04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	DIY	1 Laporan	35.218.000	APBD		1 Laporan	60.500.000
2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi		100%	49.726.600	APBD		100%	78.800.000
2.12.03.1.02.01	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	DIY	1 Laporan	41.998.300	APBD		1 Laporan	63.800.000

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.03.1.02.04	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	DIY	3 Dokumen	7.728.300	APBD		3 Dokumen	15.000.000
2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil		100%	7.026.000	APBD		100%	12.000.000
2.12.03.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	DIY	1 Laporan	7.026.000	APBD		1 Laporan	12.000.000
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan		76%	127.037.000	APBD		2 Instansi/Lembaga	146.000.000
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		100%	127.037.000	APBD		100%	134.000.000

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Provinsi							
2.12.04.1.02.01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	DIY	1 Laporan	38.482.200	APBD		1 Laporan	44.000.000
2.12.04.1.02.05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	DIY	2 Dokumen	88.554.800	APBD		2 Dokumen	90.000.000
2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Tercapaiannya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		0	0	APBD		100%	12.000.000
2.12.04.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DIY	0	0	APBD		1 Laporan	12.000.000
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase tersusunnya profil kependudukan sesuai standar		100%	69.700.000	APBD		100%	80.000.000

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan		100%	69.700.000	APBD		100%	80.000.000
2.12.05.1.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	DIY	1 Dokumen	69.700.000	APBD		1 Dokumen	80.000.000
SEKRETARIAT DAERAH									
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		87,60%	600.744.650	APBD		87,70%	1.435.585.445
0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100%	31.247.200	APBD		100%	58.300.000
0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	5 Dokumen	11.247.200	APBD		5 Dokumen	36.000.000

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	4 Dokumen	7.000.000	APBD		4 Dokumen	8.000.000
0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	2 Laporan	13.000.000	APBD		2 Laporan	14.300.000
0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah		100%	46.981.060	APBD		100%	52.906.766
0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 Dokumen	33.600.000	APBD		1 Dokumen	38.187.600
0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 Laporan	5.108.840	APBD		1 Laporan	5.619.724

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	4 Laporan	8.272.220	APBD		4 Laporan	9.099.442
0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah		12 Bulan	11.400.000	APBD		12 Bulan	13.794.000
0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 Laporan	11.400.000	APBD		1 Laporan	13.794.000
0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		100%	335.078.290	APBD		100%	516.834.679
0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 Paket	19.284.760	APBD		1 Paket	21.213.236

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	2 Paket	35.423.740	APBD		2 Paket	38.966.114
0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 Paket	7.683.390	APBD		1 Paket	8.451.729
0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	2 Paket	27.000.000	APBD		2 Paket	29.700.000
0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	2 Dokumen	15.686.400	APBD		2 Dokumen	13.503.600
0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nasional	1 Laporan	210.000.000	APBD		1 Laporan	385.000.000
0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 Dokumen	20.000.000	APBD		1 Dokumen	20.000.000

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SKPD								
0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	0	APBD		100%	390.000.000
0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	0	0	APBD		0	0
0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	0	0	APBD		1 Unit	350.000.000
0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	0	0	APBD		n/a	0

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	0	0	APBD		5 Unit	40.000.000
0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100%	2.500.000	APBD		100%	2.750.000
0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 Laporan	2.500.000	APBD		1 Laporan	2.750.000
0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	173.538.100	APBD		100%	401.000.000
0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 Unit	20.000.000	APBD		1 Unit	22.000.000

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jabatan								
0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	0	0	APBD		1 Unit	190.000.000
0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	11 Unit	111.538.100	APBD		11 Unit	143.000.000
0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	3 Unit	42.000.000	APBD		3 Unit	46.000.000
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah		100%	525.000.000	APBD		100%	1.222.750.000

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah		100%		APBD		100%	
		Persentase naskah kerja sama dalam negeri yang terealisasi		100%		APBD		100%	
4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Terlaksananya tugas pemerintahan		100%	225.000.000	APBD		100%	592.000.000
4.01.03.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	DIY	4 Dokumen	175.000.000	APBD		3 Dokumen	192.000.000
4.01.03.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	DIY, Jateng	4 Dokumen	50.000.000	APBD		4 Dokumen	400.000.000
4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Otonomi Daerah		100%	100.000.000	APBD		100%	330.750.000
4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Nasional	2 Laporan	100.000.000	APBD		2 Laporan	330.750.000
4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Terlaksananya fasilitasi kerja sama daerah		100%	200.000.000	APBD		100%	300.000.000
4.01.03.1.03.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah	Nasional	2 Dokumen	200.000.000	APBD		2 Dokumen	300.000.000

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemerintah	yang Difasilitasi							
4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSA NAAN	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik		5,10%	1.980.000.000	Dana Keistimewaan		7,65%	2.840.000.000
4.01.10.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	Terlaksananya Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan		100%	1.980.000.000	Dana Keistimewaan		100%	2.640.000.000
4.01.10.5.01.010	Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Dibina	DIY	4 Dokumen	1.980.000.000	Dana Keistimewaan		2 Dokumen	2.640.000.000
4.01.10.5.07	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana lembaga pelaksana urusan keistimewaan		0	0	Dana Keistimewaan		100%	200.000.000

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.10.5.07.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan yang Disediakan	DIY	0	0	Dana Keistimewaan		4 Unit	200.000.000

Biro Tata Pemerintahan Tahun 2024 merencanakan anggaran sebesar Rp3.794.884.650,00 untuk melaksanakan 9 Program, 19 kegiatan, dan 36 subkegiatan. Sedangkan pada Tahun 2025 Biro Tapem merencanakan anggaran sebesar Rp5.682.535.445,00 untuk melaksanakan 10 Program, 23 kegiatan, dan 45 subkegiatan. Perencanaan tersebut bersifat dinamis, dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan situasi dan kondisi kedepannya yang dapat dipengaruhi oleh Kebijakan Pimpinan, Perubahan Peraturan Perundang-Undangan atau peraturan lainnya, Kondisi dan situasi politik pusat dan daerah, dan lain-lain.

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Renja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun Anggaran 2024 memiliki keterkaitan langsung dengan Rencana Strategis Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yang disusun untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Di sisi lain, Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2022-2027 disusun sebagai dasar pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu 2022-2027 bersamaan dengan disusunnya RPJMD Tahun 2022-2027 khususnya pelaksanaan program pada tahun 2024-2027, sedangkan program, kegiatan, dan subkegiatan tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 yang disusun untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 70 Tahun 2021 dimana diinstruksikan bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada Renja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2024 ini juga mencakup program, kegiatan, dan subkegiatan yang dibiayai dari Dana Keistimewaan baik pada urusan kebudayaan, urusan pertanahan maupun urusan kelembagaan. Program Renja diselaraskan dengan program dan kegiatan di atasnya agar sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

RPJMD DIY Tahun 2022-2027 disusun dengan memperhatikan keselarasan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku, agar tercipta koordinasi dan sinkronisasi berbagai program

pembangunan, saling mendukung, konsisten, sinergi, dan selaras, yang pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Renja Biro Tata Pemerintahan berpedoman pada Visi dan Misi Kepala Daerah tahun 2022-2027, Visi Gubernur DIY Tahun 2022-2027 yang tercantum dalam pidato pemaparan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2022-2027 adalah:

*“Terwujudnya **PANCAMULIA** Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”.*

Visi pada RPJMD sebelumnya juga sudah meletakkan Pancamulia sebagai konsep utama. Pancamulia merupakan “Lima Kemuliaan” yang menggambarkan manusia Jogja. Visi tersebut merupakan keberlanjutan dan sebagai bentuk kesinambungan dengan visi dan misi Gubernur pada periode sebelumnya. Visi pada RPJMD sebelumnya juga sudah meletakkan Pancamulia sebagai konsep utama. Pancamulia merupakan “Lima Kemuliaan” yang menggambarkan manusia Jogja, lima kemuliaan tersebut yakni:

- 1) Terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing.
- 2) Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
- 3) Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan.
- 4) Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.
- 5) Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Panca Mulia” di atas menggambarkan manusia Jogja yang bermartabat mulia sebagai manusia sejahtera paripurna baik dari segi hidup-kehidupan-penghidupan sebagai individu, terlibat dan memperoleh manfaat dari ekonomi yang tumbuh dan

berkeadilan, hidup dalam harmoni kolektif dan terlindungi oleh penyelenggaraan pemerintahan demokratis yang dijalankan oleh aparatur yang berintegritas.

Upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Jogja meniscayakan perlunya kemandirian tatakelola pemerintahan yang demokratis dan sumber daya manusia aparatur sipil negara yang memiliki etos, etika dan kualitas sebagai "*Trilogi SDM-DIY*". *Etos* menyanggah pesan perubahan persepsi (*mind set*) dari tugas birokrasi sebagai pekerjaan kantoran, menjadi tugas birokrasi sebagai "karyaperadaban", yang menyanggah arti bahwa semua karya pelayanan birokrasi adalah "karya peradaban". *Etika*, menyanggah pesan "kemuliaan" dalam pengertian bersatunya "pikiran mulia, niat mulia, dan tindakan mulia", dalam rangka menciptakan SDM yang "berintegritas" yang menjunjung tinggi budaya malu dan budaya merasa bersalah apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan. *Kualitas*, menyanggah pesan adanya pergeseran *mind set*, bahwa karya birokrasi bukanlah dipersepsikan hanya sebagai "karya proyek berbasis kinerja penyerapan anggaran", melainkan menuju pada pembentukan "sikap" bahwa karya birokrasi DIY adalah "karya yang dapat menjadi rujukan" bagi birokrasi-birokrasi dan lembaga-lembaga lain di luar DIY (nasional maupun internasional). Ketika karya tersebut menjadi "rujukan", maka karya tersebut merupakan karya yang berkualitas, yang merupakan hasil dari karya yang "diniati" untuk menjadi "karya berkualitas tinggi".

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam Visi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa jabatan 2022-2027 mendukung visi terkait Reformasi Kalurahan karena menjadi *leading* Pemerintah Daerah DIY. Biro Tata Pemerintahan Setda DIY secara eksternal menjangkau hingga pemerintah kalurahan dalam kapasitas sebagai pembina dan pengawas umum penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berdasarkan kewenangan yang tertuang pada Pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan hal tersebut, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sangat berperan dalam reformasi kalurahan di DIY terutama terkait birokrasi di dalamnya.

Adapun rumusan misi pembangunan DIY tahun 2022-2027 merupakan ringkasan dari "*Panca Mulia*" visi Gubernur DIY 2022-2027 sebagaimana dijelaskan di atas. Misi-misi pembangunan DIY 2022-2027 tersebut, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;

2. Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan /pengelolaan sumber daya setempat;
3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi;
4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam Misi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa jabatan 2022-2027 mendukung misi ke tiga, yakni meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemajuan Teknologi Informasi, dengan tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi. Sesuai kewenangan dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY secara eksternal menjangkau hingga pemerintah kalurahan dalam kapasitas sebagai pembina dan pengawas umum penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. Dengan demikian, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan juga menjangkau pemerintah kalurahan melalui kebijakan reformasi birokrasi kalurahan. Hal ini sekaligus untuk melaksanakan arahan Gubernur DIY, bahwa semangat reformasi birokrasi untuk cepat dan tepat melayani diharapkan juga terimplementasi sampai Kalurahan agar masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari reformasi birokrasi, perbaikan layanan, dan sikap kerja pelayanan prima dari aparatur (disampaikan saat membuka Rakordal triwulan I 2021, tanggal 18 Mei 2021). Oleh karenanya, perlu rumusan langkah dan strategi yang sistematis berkenaan dengan reformasi birokrasi kalurahan. Rumusan tersebut tentunya akan terkait dengan perwujudan misi pertama Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa jabatan 2022-2027, yakni meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan, dengan tujuan terwujudnya kualitas hidup masyarakat.

Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah dan nasional dilaksanakan dengan menggunakan prinsip *money follows program*. Pendekatan tersebut mengutamakan pembagian sumber daya (anggaran) berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Program dan kegiatan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY mendukung tercapainya sasaran Pemda DIY yakni ***Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan***. berdasarkan rumusan tersebut, ditetapkanlah tujuan Biro Tata Pemerintahan, yang diharapkan akan tercapai di 2024 nanti yaitu; ***Optimalnya Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah***.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan perangkat daerah selama lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Perumusan tujuan dan sasaran dalam dokumen Renja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2024 ini berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Agar tercipta kesinambungan dan keselarasan pembangunan daerah, maka perumusan tujuan dan sasaran Renja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2024 ini mengacu pada visi dan misi RPJMD DIY Tahun 2022-2027, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025 tahap keempat, dan isu strategis aktual, serta merupakan rangkaian yang berkesinambungan dengan pelaksanaan RPJMD DIY tahun 2017-2022 sehingga tidak bisa terlepas dari perencanaan pada tahun sebelumnya. Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan perangkat daerah selama lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Rumusan tujuan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yaitu *"optimalnya responsivitas dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah"* dengan indikator tujuannya adalah "Persentase Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah".

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound dan continuously improve* (SMART-C), maka sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien. Pemda DIY memiliki sasaran Meningkatkan *Good Governance*, sasaran tersebut dijabarkan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menjadi tiga sasaran perangkat daerah. Terdapat tiga sasaran pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam perencanaan strategis tahun 2022-2027, yaitu:

- 1. Meningkatkan tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama dalam negeri serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren**

Indikator dari sasaran pertama Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yaitu Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama dalam negeri, pembinaan dan pengawasan Pemerintahan

Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren, serta penataan administrasi batas daerah dan toponimi. Target tahunan dari sasaran pertama ini bersifat absolut yaitu 100% setiap tahunnya. Artinya bahwa dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama dalam negeri serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren setiap tahun seluruhnya direspon dengan kebijakan. Sehingga formulasi penghitungan dari sasaran pertama ini adalah Jumlah rumusan bahan kebijakan (Perda, Pergub, SK Gubernur, SE, Peraturan Bersama, BA, Telaah Dinas, Nota Dinas) yg merespon dinamika penyelenggaraan PUM, otda dan kerja sama dalam negeri, pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kal/Kel dan Kap/Kem, serta penataan adm batas daerah dan toponimi dibagi jumlah dinamika penyelenggaraan PUM, otda dan kerja sama dalam negeri, pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren, serta penataan administrasi batas daerah dan toponimi pada tahun berjalan dikali 100%.

2. Meningkatkan tertib Administrasi Kependudukan

Indikator dari sasaran kedua Biro Tata Pemerintahan Setda DIY ini adalah Persentase kepemilikan dokumen kependudukan. Pada tahun 2023, cakupan kepemilikan dokumen penting kependudukan untuk Provinsi DIY sebesar 93,93%. Arahan peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati. Dalam upaya pengembangan statistik hayati, percepatan perluasan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil memerlukan strategi nasional sebagai strategi dan arahan kebijakan untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, integrasi antarkementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota serta pemangku kepentingan sehingga dapat menghasilkan statistik hayati yang mumpuni untuk dapat digunakan sebagai basis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Melalui strategi nasional diharapkan pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih mudah dan terintegrasi dimana masyarakat dengan mudah menjangkau layanan dan secara sadar memutakhirkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.

Formulasi penentuan target kinerja sasaran pada tiap tahunnya didapatkan dari jumlah persentase kepemilikan dokumen kependudukan yang terdiri dari Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, dan Akta Kematian. Dasar penentuan target kinerja sasaran mempertimbangkan pada target kinerja sasaran baik nasional maupun kabupaten/kota.

3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah

Indikator dari sasaran ketiga Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yaitu Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, dengan target lima tahun ke depan masuk dalam kategori A secara berturut-turut.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun-				
				Baselin e 2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Optimalnya Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama dalam negeri serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama dalam negeri, pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren, serta penataan administrasi batas daerah dan toponimi	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	93,93%	93,96 %	94,00 %	94,04 %	94,33 %
		3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	A	A	A	A

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY (2023)

Tujuan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yaitu *Optimalnya Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Sedangkan untuk sasaran strategisnya ada 3 (tiga) diantaranya; 1) Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama dalam negeri serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren (target 100%), 2). Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan (target 93,96%), 3) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah (target A).

3.3 Program dan Kegiatan

**Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama Perangkat Daerah : Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Kode	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Tujuan	Optimalnya Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%		100%	
Sasaran 1	Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama dalam negeri serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama dalam negeri, pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren, serta penataan administrasi batas daerah dan toponimi	100%		100%	
2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tersinkronisasi	57%	214.140.000	71%	300.000.000

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**

Kode	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksananya pengelolaan tanah kasultanan, tanah kadipaten yang meliputi aspek penatausahaan, aspek pemeliharaan dokumen, aspek pengawasan	2 Dokumen	214.140.000	2 Dokumen	300.000.000
2.10.11.5.01.01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat	2 Dokumen	214.140.000	2 Dokumen	300.000.000
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase rumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren	100%	50.000.000	100%	64.000.000
2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100%	50.000.000	100%	64.000.000
2.13.04.1.01.02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	20.000.000
2.13.04.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	1 Dokumen	0	1 Dokumen	22.000.000

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**

Kode	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.13.04.1.01.05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	0	1 Dokumen	22.000.000
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Presentase rumusan bahan kebijakan urusan kebudayaan	0	0	100%	500.000.000
2.22.08.501	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Jumlah laporan pengelolaan sejarah, bahasa, sastra dan museum	0	0	100%	500.000.000
2.22.08.501.01	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	0	0	1 Dokumen	500.000.000
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah	100%	525.000.000	100%	1.222.750.000
		Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah	100%		100%	
		Persentase naskah kerja sama dalam negeri yang terealisasi	100%		100%	
4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Terlaksananya tugas pemerintahan	100%	225.000.000	100%	592.000.000
4.01.03.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	4 Dokumen	175.000.000	3 Dokumen	192.000.000

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**

Kode	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.01.03.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	400.000.000
4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Otonomi Daerah	100%	100.00.000	100%	330.750.000
4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	330.750.000
4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Terlaksananya fasilitasi kerja sama daerah	100%	200.000.000	100%	300.000.000
4.01.03.1.03.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	300.000.000
4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik	5,10%	1.980.000.000	7,65%	2.840.000.000
4.01.10.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	Terlaksananya embinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	100%	1.980.000.000	100%	2.640.000.000
4.01.10.5.01.010	Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Dibina	4 Dokumen	1.980.000.000	2 Dokumen	2.640.000.000

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**

Kode	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.01.10.507	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana lembaga pelaksana urusan keistimewaan	0	0	100%	200.000.000
4.01.10.507.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan yang Disediakan	0	0	4 Unit	200.000.000
Sasaran 2	Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	93,96%		94,00%	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa kependudukan (KTPel dan KIA) bagi masyarakat di DIY	88.75%	136.292.400	88.80%	228.700.000
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan pendaftaran kependudukan	100%	58.160.200	100%	95.000.000
2.12.02.1.01.02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	80 Dokumen	28.160.200	80 Dokumen	60.000.000
2.12.02.1.01.05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	35.000.000

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**

Kode	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	100%	78.132.200	100%	133.700.000
2.12.02.1.02.01	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	21.182.200	1 Laporan	23.700.000
2.12.02.1.02.02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	56.950.000	1 Laporan	110.000.000
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa penting (Akta kelahiran bagi anak dan Akta kematian) bagi masyarakat di DIY	99.18%	91.970.600	99.23%	151.300.000
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	100%	35.218.000	100%	60.500.000
2.12.03.1.01.04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan	35.218.000	1 Laporan	60.500.000
2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	100%	49.726.600	100%	73.000.000
2.12.03.1.02.01	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	41.998.300	1 Laporan	58.000.000

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**

Kode	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.12.03.1.02.04	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	3 Dokumen	7.728.300	3 Dokumen	15.000.000
2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil	100%	7.026.000	100%	12.000.000
2.12.03.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	7.026.000	1 Laporan	12.000.000
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Presentase akumulasi instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	76 %	127.037.000	84 %	146.000.000
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	100%	127.037.000	100%	134.000.000
2.12.04.1.02.01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	38.482.200	1 Laporan	44.000.000
2.12.04.1.02.05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	2 Dokumen	88.554.800	2 Dokumen	90.000.000

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**

Kode	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	0	0	100%	12.000.000
2.12.04.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	0	1 Laporan	12.000.000
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase tersusunnya profil kependudukan sesuai standar	100%	69.700.000	100%	80.000.000
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan	100%	69.700.000	100%	80.000.000
2.12.05.1.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	1 Dokumen	69.700.000	1 Dokumen	80.000.000
Sasaran 3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A		A	
0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,60%	600.744.650	87,70%	855.585.445

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**

Kode	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	31.247.200	100%	58.300.000
0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	11.247.200	5 Dokumen	36.000.000
0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	7.000.000	4 Dokumen	8.000.000
0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	13.000.000	2 Laporan	14.300.000
0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	46.981.060	100%	52.906.766
0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	33.600.000	1 Dokumen	38.187.600
0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.108.840	1 Laporan	5.619.724
0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	8.272.220	4 Laporan	9.099.442

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**

Kode	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah	12 Bulan	11.400.000	12 Bulan	13.794.000
0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	11.400.000	1 Laporan	13.794.000
0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100%	335.078.290	100%	516.834.679
0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.284.760	1 Paket	21.213.236
0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	35.423.740	2 Paket	38.966.114
0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.683.390	1 Paket	8.451.729
0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	27.000.000	2 Paket	29.700.000
0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	15.686.400	2 Dokumen	13.503.600
0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	210.000.000	1 Laporan	385.000.000
0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**

Kode	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	0
0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	0	0
0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0	0
0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	0	0
0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0
0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	2.500.000	100%	2.750.000
0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	2.750.000
0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	173.538.100	100%	211.000.000
0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	20.000.000	1 Unit	22.000.000

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**

Kode	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>), Kegiatan (<i>output</i>), dan subkegiatan	Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	1 Unit	190.000.000
0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	111.538.100	11 Unit	143.000.000
0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	42.000.000	3 Unit	46.000.000
Total				3.794.884.650		5.682.535.445

Sumber : Biro Tata Pemerintahan Setda DIY (2023)

Biro Tata Pemerintahan Tahun 2024 merencanakan anggaran sebesar Rp3.794.884.650,00 untuk melaksanakan 9 Program, 19 kegiatan, dan 36 subkegiatan. Sedangkan pada Tahun 2025 Biro Tapem merencanakan anggaran sebesar Rp5.682.535.445,00 untuk melaksanakan 10 Program, 23 kegiatan, dan 45 subkegiatan. Perencanaan tersebut bersifat dinamis, dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan situasi dan kondisi kedepannya yang dapat dipengaruhi oleh Kebijakan Pimpinan, Perubahan Peraturan Perundang-Undangan atau peraturan lainnya, Kondisi dan situasi politik pusat dan daerah, dan lain-lain.

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja merupakan dokumen tahunan yang berpedoman pada dokumen renstra perangkat daerah. Pada Tahun Anggaran 2024, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY akan melaksanakan 9 Program (7 Program APBD Murni, 2 Program Dana Keistimewaan), 19 kegiatan (17 Kegiatan APBD Murni, 2 Kegiatan Dana Keistimewaan), dan 36 subkegiatan (34 Sub kegiatan APBD Murni, 2 Sub kegiatan Dana Keistimewaan). Keseluruhan rencananya akan dibiayai dengan skema anggaran APBD dan Dana Keistimewaan. Lebih jelasnya berikut Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024 yang akan dilaksanakan oleh Biro Tata Pemerintahan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Biro Tata Pemerintahan pada khususnya dan Pemerintah Daerah DIY pada umumnya.

Tabel 4.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya tertib tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama dalam negeri serta Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/ Kemantren	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama dalam negeri, pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren, serta penataan administrasi batas daerah dan toponimi	100%
2	Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	93,96%
3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A

Disamping skema penganggaran APBD reguler, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY juga menerima kegiatan dengan skema APBD melalui pendanaan Dana Keistimewaan (Danais) untuk urusan Keistimewaan yakni pada urusan pertanahan, kebudayaan, serta kelembagaan dan ketatalaksanaan. Secara mendetail belum bisa disampaikan, karena kegiatan beserta angka nominal anggarannya merupakan pemberian dari pemerintah pusat.

BAB 5 PENUTUP

Renja 2024 ini merupakan gambaran kinerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam melaksanakan ketugasan dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Renja 2024 diharapkan dapat memudahkan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam menyusun rencana kegiatan dan program tahunan secara terpadu, terarah dan terukur; menyediakan acuan resmi bagi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan daerah yang dibiayai dari APBD; memudahkan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam memahami dan menilai prioritas, sasaran, dan program-program operasional tahunan; serta sebagai tolok ukur bagi evaluasi dan penilaian kinerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.

Program dan kegiatan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam Renja Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah; serta sejumlah peraturan perundangan nasional, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Sehubungan dengan beberapa peraturan perundangan tersebut, terdapat sejumlah momen penting yang perlu diperhatikan oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tahun 2022 dan 2023, yang bisa mempengaruhi langkah Biro Tata Pemerintahan kedepannya. Sejumlah momen penting dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan beberapa kebijakan bidang Kependudukan, misalnya kebijakan KIA (Kartu Identitas Anak), IKD (Identitas Kependudukan Digital) dan percepatan pelayanan di bidang administrasi kependudukan.
2. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY di tahun 2022.
3. Reformasi Birokrasi Kalurahan yang tertuang pada RPJMD 2022-2027.

Pada tahun anggaran 2024, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY mengusulkan 9 Program (7 Program APBD Murni, 2 Program Dana Keistimewaan), 19 kegiatan (17 Kegiatan APBD Murni, 2 Kegiatan Dana Keistimewaan), dan 36 subkegiatan (34 Sub kegiatan APBD Murni, 2 Sub kegiatan Dana Keistimewaan) yang kegiatannya dibiayai APBD dan Dana Keistimewaan dengan Penganggaran sebesar Rp3.794.884.650,00. Di antara kesepuluh program tersebut terdapat 2 (dua) program yang didanai oleh Dana Keistimewaan, yakni Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Dalam mencapai target program dan kegiatan di Tahun 2024, Biro Tata Pemerintahan membutuhkan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di DIY.

Lampiran

Formulir E. 29

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Renja Perangkat Daerah
Provinsi: Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja Perangkat Daerah provinsi	ada			
2.	Pengolahan data dan informasi	ada			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah	ada			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah provinsi tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah provinsi	ada			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi	ada			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD provinsi	ada			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran	ada			
8.	Penelaahan usulan masyarakat	ada			
9.	Perumusan kegiatan prioritas	ada			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi	ada			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota	ada			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi	ada			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	ada			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan	ada			
11.	Sasaran Program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan	ada			

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
	penganggaran terpadu				
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah provinsi	ada			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	ada			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah provinsi yang telah disahkan	ada			

Yogyakarta, 28 Juli 2023

KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA



KPH. YUDANEGARA, Ph.D.
NIP. 198110262002031001



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦺꦥꦠꦶꦲꦤ꧀ꦢꦤꦸꦫꦺꦗꦤ꧀ꦲꦶꦏꦿꦠ

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Psw. 1251

Faksimile (0274) 581507, Website: birotapem.jogjaprov.go.id

Email: rotapem@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 050/0790**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY TAHUN 2024**

**KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 108 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

b. bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 melalui Keputusan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 1312 Tahun 2017);
8. Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala daerah Berakhir pada Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DIY DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BIRO TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan pengolahan data dan informasi;
 2. Menganalisis gambaran pelayanan perangkat daerah;
 3. Menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 4. Merumuskan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan rencana kerja perangkat daerah;
 5. Merumuskan indikator sasaran, indikator program tahun 2024;
 6. Mengikuti seluruh tahapan penyusunan rencana kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Memproses penetapan rencana kerja perangkat daerah oleh kepala Perangkat Daerah.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kerja;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 20 Januari 2023

**KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



A. UBAIDILLAH.
NIP. 198110262002031001

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH DIY
NOMOR : 050/0790
TANGGAL : 20 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BIRO TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH DIY
TAHUN 2024**

No.	N A M A	NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	Achmad Ubaidillah, S.E., M.Si., Ph.D..	198110262002031001	Kepala Biro	Ketua
2.	Rini Sri Wahyuni, S.E, M.M.	197502181998032002	Kasubbag Tata Usaha	Sekretaris
3.	Agustina Pangestujati, S.I.P,	197808222005012008	Kabag. Pemerintahan Umum	Koordinator 1
4.	Dyah Wiratni Hastuti, S.IP, MPA.	198304032009022005	Analisis Kebijakan Muda	Koordinator 2
5.	Galih Ria Hidayati, S.E, M.Si	198310042006042011	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
6.	Andriyan Muryanto, S.H., M.A.	198005082011011004	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
7.	Nur Legawa, S,IP., M.Ec, M.Ec.Dev	198412272010011011	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
8.	Alexander Priyasma, S,IP	198404282011011008	Kasubbag. Bina Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Anggota
9.	Raden Dwi Atma Bagus Irawan, M.Sc	198206152009121003	Kasubbag Bina Pencatatan Sipil	Anggota
10.	Gigusa Ella, S.H., M.H.	198702132011011009	Analisis Kerja Sama	Anggota
11.	Wahyu Cahyaningsih, S.IP	198702022015022002	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
12.	Arrof Fefkhiatin, S.IP	199102082015022002	Analisis Desa/Kalurahan	Anggota
13.	Apriyanto Pandu Gunawan,S.Kom	199304102019031010	Penyurvei Batas Wilayah Administrasi	Anggota
14.	Rosemeini Heraningtyas, S.I.P	199805232022022003	Analisis Tata Praja	Anggota
15.	Arif Ardiasmono, S. Kom	199505042020121015	Calon Administrator Database	Anggota

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**

No.	N A M A	NIP	JABATAN	KETERANGAN
			Kependudukan Ahli Pertama	
16.	Rachmadilla Sekar Larasati, S.I.P.	199701302020122011	Calon Analis Kebijakan Pertama	Anggota
17.	Nabila Alif Azzura	200002172021022001	Pengelola Akuntansi	Anggota

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal : 20 Januari 2023

KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



A. UBAIDILLAH.
NIP. 198110262002031001



Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Komplek Kapatihan, Danurejan, Yogyakarta

Telp. (0274) 562811 Email: rotapem@jogjaprov.go.id

Website: birotapem.jogjaprov.go.id